

Vol. 13, No. 1  
April 2026

p-ISSN: 2407-0556  
e-ISSN: 2599-3267

**Riwayat Artikel:**  
Diserahkan:  
25 Maret 2025

Direvisi:  
16 Mei 2026

Diterima:  
26 Mei 2026

## Aksi Sosial Katolik, Oposisi terhadap Penguasa, dan Sikap Nasionalis Katolik di Jawa pada Awal Abad ke-20

### *Catholic Social Action, Opposition to the Authorities, and Catholic Nationalist Attitudes in Indonesia in the Early 20th Century*

**Amos Sukamto**   
STT INTI Bandung, Indonesia

**Korespondensi**  
amossukamto@gmail.com

**DOI**  
<https://doi.org/10.33550/sd.v13i1.591>

**Halaman**  
37-65

#### **Abstract**

*This article focuses on Catholic involvement in national struggles, both through education, politics, and the struggle for independence. Using historical methods, several findings are obtained. The development of social action and nationalist attitudes among Javanese Catholics resulted from a dialectical interaction between global inspiration and local dynamics. The experiences of European Catholics' socio-political struggles and papal encyclicals served as sources of inspiration, which were then diffused to the Dutch East Indies through missionaries. This diffusion process was effective because it met local needs, namely a sense of indigenous emancipation and national awakening. In the local context, the Van Lith educational institution produced a Javanese Catholic elite. Graduates became agents of modernization, connecting universal Catholic values with national aspirations, while simultaneously forming a collective identity rooted in Javanese culture. This identity became the basis of solidarity that fostered the emergence of Javanese Catholic social and political organizations. The Javanese Catholic political movement was an effort to build counter-hegemony against Dutch colonial domination, manifested in a critical stance against government policies and its support for local people.*

**Keywords:** *Javanese Catholicism, nationalism, Van Lith, Kasimo, counter-hegemony*

#### **Abstrak**

Artikel ini berfokus pada keterlibatan Katolik dalam perjuangan bangsa, baik melalui bidang pendidikan, politik, maupun perjuangan kemerdekaan. Dengan menggunakan metode sejarah, artikel ini menghasilkan beberapa temuan. Perkembangan aksi sosial dan sikap nasionalis Katolik Jawa merupakan hasil interaksi dialektis antara inspirasi global dan dinamika lokal. Pengalaman tentang pergumulan sosial-politik umat Katolik Eropa serta ensiklik Paus menjadi sumber inspirasi yang kemudian didifusikan ke Hindia Belanda melalui para misionaris. Proses difusi ini berjalan efektif karena bertemu dengan kebutuhan lokal, yakni kesadaran emansipasi pribumi dan kebangkitan nasional. Dalam konteks lokal, lembaga pendidikan Van Lith melahirkan elite Katolik Jawa. Para lulusan sekolah menjadi agen modernisasi, menghubungkan nilai-nilai universal Katolik dengan aspirasi kebangsaan, sekaligus membentuk identitas kolektif yang berakar pada budaya Jawa. Identitas ini menjadi basis solidaritas yang mendorong lahirnya organisasi sosial dan politik Katolik Jawa. Gerakan politik Katolik Jawa merupakan upaya membangun kontrahegemoni terhadap dominasi kolonial Belanda, yang diwujudkan dalam sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan keberpihakannya kepada pribumi.

**Kata-kata Kunci:** Katolik Jawa, nasionalisme, Van Lith, Kasimo, kontrahegemoni

## Pendahuluan

Partisipasi Gereja Katolik Roma (GKR) dalam ranah politik bukan merupakan suatu fenomena baru. Pada 1871, GKR secara tegas menentang kebijakan *Kulturkampf* yang dicanangkan oleh Otto von Bismarck. Kebijakan ini bertujuan untuk memisahkan agama dari negara, memutus keterkaitan antara gereja dan pendidikan, serta memperkuat kontrol negara atas institusi dan pejabat gerejawi. Melalui langkah ini, Bismarck berupaya melemahkan kekuatan politik GKR dan mematahkan aliansi kekuasaan yang selama ini dimiliki oleh gereja.<sup>1</sup>

Dalam Ensiklik *Quod nunquam* tertanggal 15 Februari 1875 yang ditujukan kepada para uskup di Prusia, Paus Pius IX menegaskan prinsip ketaatan iman dengan pernyataan: adalah lebih tepat untuk menaati Tuhan daripada menaati manusia.<sup>2</sup> Penegasan ini mencerminkan sikap GKR ketika menghadapi tekanan negara selama masa *Kulturkampf*.<sup>3</sup> Umat Katolik dan imam bersatu melawan *Kulturkampf* dengan menggunakan kekuatan The Centre Party.<sup>4</sup> Tekanan politik dan solidaritas umat ini pada akhirnya memaksa Otto von Bismarck secara bertahap mengakhiri *Kulturkampf*. Pada 1880-an GKR berhasil memperoleh kembali beberapa haknya dari negara.<sup>5</sup>

Perkembangan kesadaran sosial-politik di kalangan umat Katolik Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya berbagai gerakan dan organisasi seperti yang terjadi di Paris,<sup>6</sup> Leipzig, Jerman,<sup>7</sup> dan Swiss.<sup>8</sup> Perhatian GKR terhadap isu-isu sosial-politik mengalami perkembangan signifikan dan mendapat momentum setelah Paus Leo XIII mengeluarkan ensiklik *Rerum Novarum* pada 1891.<sup>9</sup> *Rerum Novarum* menjadi tonggak penting dalam pengembangan doktrin sosial Katolik karena berisi doktrin Katolik yang berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi. Ensiklik ini merupakan respons gereja terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan dalam hubungan majikan dengan buruh.<sup>10</sup> *Rerum Novarum* merepresentasikan respons moral dan teologis gereja terhadap berbagai bentuk ketimpangan sosial yang muncul akibat industrialisasi. Pada awal abad ke-20 mulai berkembang gerakan di antara kaum awam Katolik yang disebut *Azione Cattolica (Catholic Action)*. Tujuannya adalah pembaharuan kehidupan Katolik dalam keluarga dan masyarakat serta penginjilan dunia.<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Werner Conze, "The German Empire," dalam *The New Cambridge Modern History Vol. XI Material Progress and World-Wide Problems 1870-1898*, peny. F. H. Hinsley (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), 287.

<sup>2</sup> Roberto de Mattei, "Obedience and Resistance in the History of the Church," *Voice of The Family*, 19 Mei 2018, <https://voiceofthefamily.com/roberto-de-mattei-obedience-and-resistance-in-the-history-of-the-church/>.

<sup>3</sup> Conze, "The German Empire," 288.

<sup>4</sup> Douglas W. Hatfield, "Kulturkampf: The Relationship of Church and State and the Failure of German Political Reform," *Journal of Church and State* 23, no. 3 (1981): 465–84, <https://doi.org/10.1093/jcs/23.3.465>.

<sup>5</sup> John S. Lowry (peny.), "Anticlericalism and the Scars of the *Kulturkampf*, 1864–1904," dalam *Big Swords, Jesuits, and Bondelswarts: Wilhelmine Imperialism, Overseas Resistance, and German Political Catholicism, 1897–1906* (Leiden: Brill, 2016), 49–50.

<sup>6</sup> Anonymous, "Buitenlandsche Berichten," *De Avondpost Dagblad Voor Stad En Land*, 10 Maret 1892, 3.

<sup>7</sup> Anonymous, "Buitenlandsche Berichten," 3.

<sup>8</sup> Anonymous, "Zwitserland," *Utrechtsch Provinciaal En Stedelijk Dagblad*, 2 Februari 1890, 5.

<sup>9</sup> David Thomson, "Social and Political Thought," dalam *The New Cambridge Modern History Vol. XI Material Progress and World-Wide Problems 1870-1898*, peny. F.H. Hinsley (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), 118.

<sup>10</sup> Paus Leo XIII, "Rerum Novarum," dalam *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991*, peny. R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999), 17–58.

<sup>11</sup> John C. Bates, "Father Daniel A. Lord S.J., and Catholic Action in Western Pennsylvania 1925-1954," *Gathered Fragments*, 2019, 4.

Berbagai dinamika sosial-politik umat Katolik di Eropa tersebut menunjukkan bahwa GKR tidak hanya berfokus pada persoalan spiritual, tetapi juga terlibat aktif untuk merespons tantangan sosial-ekonomi dan politik pada masanya. Organisasi-organisasi sosial yang lahir, baik di Jerman, Prancis, maupun Swiss, memperlihatkan pola baru partisipasi umat Katolik, khususnya kaum awam, ketika memperjuangkan keadilan sosial sesuai dengan ajaran gereja. Gerakan ini secara tidak langsung membentuk tradisi keterlibatan sosial-politik GKR di tingkat global, yang kemudian turut memengaruhi perkembangan kesadaran dan praksis sosial-politik GKR di berbagai wilayah dunia, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, pengalaman Katolik di Eropa menjadi landasan konseptual dan inspiratif bagi lahirnya bentuk-bentuk partisipasi sosial-politik Katolik dalam konteks kolonial Indonesia.

Saat ini, studi arus utama tentang nasionalisme Indonesia cenderung menitikberatkan pada organisasi nasionalis-sekuler, Islam, atau kelompok elite politik besar. Sementara itu, kontribusi minoritas Katolik Jawa—khususnya melalui pendidikan misi, organisasi sosial, dan artikulasi politik Katolik pribumi—masih belum banyak ditempatkan sebagai bagian integral dari sejarah kebangkitan nasional. Oleh sebab itu, artikel ini mengisi kekosongan historiografi tersebut dengan menelusuri hubungan antara aksi sosial Katolik, pembentukan elite Jawa terdidik, dan artikulasi nasionalisme Katolik pada awal abad ke-20.

Meskipun jumlah penganut Katolik relatif kecil dibandingkan komunitas mayoritas, peran tokoh-tokoh Katolik Jawa penting untuk ditampilkan sebagai bukti nyata keterlibatan GKR dalam dinamika perjalanan kebangsaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Van Lith, Albertus Soegijapranata, dan I. J. Kasimo menjadi representasi nyata keterlibatan Katolik dalam pergolakan kebangsaan, baik melalui bidang pendidikan, politik, maupun perjuangan kemerdekaan. Menariknya, kiprah politik mereka tidak jarang menempatkan GKR dalam posisi oposisi terhadap penguasa, khususnya ketika kebijakan penguasa dinilai bertentangan dengan ajaran iman dan prinsip moral Katolik. Studi ini berupaya mengkaji aksi sosial GKR yang diwujudkan dalam konteks Indonesia, bentuk oposisi para tokoh Katolik terhadap penguasa kolonial, serta kontribusi Katolik Jawa terhadap kebangkitan semangat nasionalisme pada awal abad ke-20.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan. Pertama, heuristik yang berasal dari kata Yunani, *heuriskein* (memperoleh).<sup>12</sup> Dari arti inilah, kemudian heuristik dihubungkan dengan kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Dalam artikel ini, sumber primer terdiri atas *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië*, majalah misi, koran kolonial, dokumen organisasi, dan arsip gerejawi. Sementara itu, sumber sekunder didapat dari historiografi Gereja Katolik, sejarah nasionalisme, dan sejarah sosial-politik kolonial.

Kedua, kritik untuk menentukan keaslian sumber dan meneliti kredibilitas sumber. Dokumen sejarah tidak bisa dilepaskan dari subjektivitas penulisnya. E. H. Carr

---

<sup>12</sup> Gustaf Johannes Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 113.

menyatakan, “Sebelum Anda mempelajari sejarah, pelajarilah sejarawan.”<sup>13</sup> Oleh karena itu, dalam membaca dokumen sejarah, kritik sumber dilakukan dengan memperhatikan konteks penerbitan, posisi ideologis media kolonial, latar belakang penulis, serta kemungkinan bias misioner ketika merepresentasikan umat Katolik pribumi dan gerakan nasionalis.

Ketiga, interpretasi, yakni menafsirkan fakta-fakta sejarah. Gejala dipandang kompleks sehingga perlu dianalisis dari pelbagai perspektif, yaitu ekonomi, sosial, politik, kultural, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Historiografi, usaha untuk menuliskan hasil penelitian dengan memperhatikan kronologi.

Secara temporal, artikel ini membatasi kajian pada periode akhir abad ke-19 hingga akhir 1930-an. Secara spasial, fokus utama penelitian adalah Jawa, terutama Muntilan, Yogyakarta, Batavia, Surabaya, dan Semarang, dengan konteks global Katolik Eropa sebagai latar inspiratif.

### **Bertumbuhnya Aksi Sosial Katolik pada Awal Abad Ke-20 Katholieke Sociale Bond (KSB)**

Di Surabaya, keinginan umat Katolik untuk berorganisasi secara sosial-politik telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada Januari 1908, muncul gagasan untuk membentuk sebuah Asosiasi Pemilihan Katolik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Broederschool pada 28 Maret 1908. Pertemuan tersebut memutuskan untuk mendirikan Bond van Katholieken (BK). BK mengadakan pertemuan resmi pertamanya pada 1 Mei 1908. Anggaran Dasar serta Peraturan Rumah Tangga organisasi ini diajukan kepada Vikaris Apostolik serta Pemerintah Hindia Belanda untuk memperoleh legalitas. Pengajuan tersebut akhirnya disetujui melalui Keputusan Pemerintah pada 24 Juli 1909 (Staatsblad No. 391).<sup>15</sup> Pada waktu pemilihan dewan kota di Surabaya, dua orang Katolik terpilih, yaitu Smits (direktur sebuah lembaga keuangan) dan Suys (guru di H.B.S.).<sup>16</sup>

Mulai Juni 1912, BK Surabaya menerbitkan majalah *Onze Bode* sebagai media resminya.<sup>17</sup> Melalui *Onze Bode*, berbagai isu keagamaan, sosial, dan politik mendapat ruang pembahasan. Majalah tetap beredar hingga tahun 1919.<sup>18</sup> Keberadaan BK Surabaya menjadi katalis bagi munculnya organisasi serupa di berbagai kota lain di Hindia Belanda seperti di Semarang. Di Semarang, BK didirikan pada akhir 1910 atau awal 1911.<sup>19</sup>

Pada 1912, mulai muncul kesadaran di antara para pemimpin Katolik untuk mempunyai perwakilannya di dewan (*Raad*). Sampai tahun 1912, hanya ada satu perwakilan Katolik di dewan, yaitu di Surabaya melalui BK, sedangkan di Batavia dan

<sup>13</sup> Edward Hallett Carr, *Apa Itu Sejarah?* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 56.

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2016), 106–7.

<sup>15</sup> A. I. van Aernsbergen (peny.), *Chronologisch Overzicht van de Werkzaamheid Der Jezuiten in de Missie van N. O.-I. Bij den 75sten Verjaardag van Hun Aankomst in de Nieuwe Missie 1859 - 9 Juli - 1934* (Amsterdam: N.V. de R.K. Boekcentrale, 1934), 239.

<sup>16</sup> Anonymous, “Katholieke Actie in Indië,” *Limburger Koerier*, 29 September 1909, 2.

<sup>17</sup> Anonymous, “Telegrammen Uit de Locomotief,” *De Nieuwe Vorstenlanden*, 19 September 1910, 3.

<sup>18</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 251.

<sup>19</sup> Karel Steenbrink, *Catholics in Indonesia, 1808-1942: The Spectacular Growth of a Self-Confident Minority, 1903-1942* (Leiden: KITLV Press, 2007), 2:30.

Semarang tidak ada.<sup>20</sup> Kesadaran ini dipicu oleh acara *Sociale Week* (Pekan Sosial) di Rotterdam pada 1908. Kegiatan ini membahas berbagai topik politik kota.<sup>21</sup> Bagi para pemimpin Katolik, agama tidak hanya punya peran dalam ranah privat, tetapi juga dalam ranah publik.<sup>22</sup> Keterlibatan orang-orang Katolik Surabaya dalam ranah publik mendapat pujian,

Hanya umat Katolik di Surabaya yang menjadi pengecualian, dan barangkali terutama karena kelas menengah lebih terwakili di antara mereka di kota perdagangan ini daripada di Batavia yang birokratis, dan umat Katolik di sana telah menemukan titik persatuan dengan para Bruder Pendeta, yang, melalui sekolah mereka, yang telah berdiri di sana selama lima puluh tahun, telah menjalin persahabatan dengan semua kalangan penduduk.<sup>23</sup>

Sebaliknya, umat Katolik di Batavia mendapat kritikan, "... hanya umat Katolik di Batavia yang tetap secara resmi bandel<sup>24</sup> dan mengisolasi diri dari kehidupan publik"<sup>25</sup>

Sebenarnya, di Batavia sejak 1911, gagasan untuk mendirikan organisasi serupa sudah ada. Berdasarkan rapat pendiri pada 12 Mei 1911, perkumpulan muda tersebut diberi nama *Katholieke Sociale Bond* (KSB).<sup>26</sup> Meskipun demikian, realisasi pendirian organisasi ini tidak berlangsung cepat. Proses konsolidasi ide dan dukungan internal tampaknya memerlukan waktu yang cukup panjang. Peran sentral yang mewujudkan gagasan ini dimainkan oleh Pastor Jan van Rijckevorsel, SJ. Melalui kepemimpinannya, KSB akhirnya secara resmi didirikan pada 12 Mei 1913 di Batavia.<sup>27</sup> Sebelumnya, pada 4 Mei 1913, telah diadakan pertemuan awal yang mempertemukan berbagai unsur umat Katolik untuk membahas pendirian organisasi ini. Dalam pertemuan tersebut, struktur kepengurusan ditetapkan dan mendapat dukungan dari umat Katolik di Bogor dan Cirebon. Van Rijckevorsel, tokoh sentral KSB dan Liga Pemuda (*Jeugdbonden*) Katolik, ditunjuk sebagai penasihat rohani.<sup>28</sup> KSB bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial Hindia Belanda yang sesuai dengan prinsip-prinsip Katolik dengan lingkup awal di Jawa Barat karena Semarang dan Surabaya telah memiliki liga Katolik mereka sendiri.<sup>29</sup> Dengan pengakuan pemerintah melalui Besluit tanggal 1 Juli 1915 No. 43, KSB Batavia resmi diakui berbadan hukum.<sup>30</sup> Secara bertahap, cabang-cabang KSB berdiri di berbagai kota di Jawa maupun Sumatra sehingga pada akhir 1910-an terdapat 18 cabang aktif di seluruh Hindia Belanda.<sup>31</sup>

Sebagai media resmi, KSB menerbitkan majalah bulanan *Sociaal Leven* sejak 20 September 1919 di Batavia.<sup>32</sup> Majalah ini menjadi wadah artikulasi ide-ide sosial, religius,

---

<sup>20</sup> Anonymous, "Brieven Uit Indie," *De Tijd* (Batavia), 10 Juni 1912, 1.

<sup>21</sup> Anonymous, "Brieven Uit Indie," 1.

<sup>22</sup> Anonymous, "Brieven Uit Indie," 1.

<sup>23</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "Brieven Uit Indie," 1.

<sup>24</sup> Sebagaimana yang digambarkan dalam sumber kolonial.

<sup>25</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "Brieven Uit Indie," 1.

<sup>26</sup> J. J. H. M. van Rijckevorsel, "De Katholieke Sociale Bond Te Batavia," *De Java Post* (Bandoeng), 27 Juni 1913, 1.

<sup>27</sup> Steenbrink, *Catholics in Indonesia*, 2:30.

<sup>28</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 255.

<sup>29</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 255.

<sup>30</sup> Anonymous, "Katholieke Sociale Bond," *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 17 Juli 1915, 6.

<sup>31</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 255.

<sup>32</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 281.

dan politik umat Katolik, sekaligus alat konsolidasi bagi cabang-cabang KSB di berbagai daerah.<sup>33</sup>

Pada 1920-an, struktur organisasi KSB semakin menguat dengan terbentuknya Dewan Pusat Perhimpunan Sosial Katolik di Batavia. Kepengurusan pusat terdiri dari penasihat rohani RP. V. Beekman O.F.M., ketua P.H.M. Hildebrand, sekretaris J.H. Meesterman, serta beberapa anggota lainnya. BK kemudian bergabung dengan KSB. KSB mengembangkan divisi-divisi khusus, termasuk komisi film, untuk mendukung kegiatan sosial dan pendidikan. Hingga pertengahan 1920-an, cabang-cabang KSB telah tersebar di 18 kota besar Hindia Belanda.<sup>34</sup> Kehadiran cabang-cabang ini memperlihatkan upaya KSB untuk memperluas pengaruh sosial-keagamaan umat Katolik serta memperkuat jaringan komunitas yang didasarkan pada nilai-nilai Katolik.

### **Katholieke Jongelingen Bond**

J. V. Rijckevorsel mendirikan Persatuan Pemuda Katolik Roma di Batavia pada 1 September 1914 yang mendapat persetujuan dari Uskup E. S. Luypen, Vikaris Apostolik Batavia.<sup>35</sup> Pada awalnya kegiatan diadakan di halaman sekolah Parapatan milik Suster Ursulin di Postweg.<sup>36</sup> Anggotanya adalah khusus anak-anak laki-laki Katolik yang telah menyelesaikan sekolah dasar dan menerima Komuni Kudus Pertama. Perkumpulan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan fisik, spiritual, dan religius para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip Katolik.<sup>37</sup> Pada 1935, terdapat juga Persatuan Gadis Katolik (Katholieke Meisjes-Bond).<sup>38</sup>

### **Indische Katholieke Partij**

Pada tanggal 22 Juli 1917 di Batavia, didirikan Persatuan Katolik untuk Aksi Politik (Katholieke Vereniging voor politieke actie) di bawah kepemimpinan Feber. Atas permintaan persatuan tersebut, Jos Schmutzer ditunjuk sebagai anggota Dewan Rakyat (Volksraad) yang secara resmi dilantik pada 18 Mei 1918.<sup>39</sup>

Pada awal 1918, organisasi serupa juga didirikan di Semarang, Surabaya, Magelang, dan Yogyakarta. Tidak lama kemudian, menyusul Bogor, Bandung, Padang, dan Medan. Sebagai payung dari organisasi-organisasi lokal tersebut, didirikan Indische Katholieke Partij (IKP) di Batavia pada 7 November dengan persetujuan Vikaris Apostolik Batavia pada 22 November 1918.<sup>40</sup> Pada fase ini, para aktor organisasi sosial tersebut didominasi oleh orang-orang Eropa dan Indo. Keterlibatan kaum pribumi hampir tidak ada.

---

<sup>33</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 280.

<sup>34</sup> Anonymous, (peny.), *Handboekje van de Katholieke Onderwijzersbond in Nederlandsch Indie Deel I* (Batavia: K.O.B, 1938), 82.

<sup>35</sup> E. D. Vermeulen, *Verslag Der Werkzaamheden van Den Katholieken Jongelingen-Bond Te Batavia Gedurende Zijn Derde Vereenigingsjaar: April 1916 - 31 Maart 1917*. (Weltevreden, 1917), 1.

<sup>36</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 264.

<sup>37</sup> Vermeulen, *Verslag Der Werkzaamheden*, 1.

<sup>38</sup> J. Huygens, "Katholiek Leven Te Semarang," *De Locomotief*, 14 Oktober 1935, 3.

<sup>39</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 273.

<sup>40</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 273.

## Kebangkitan Nasional di Antara Pribumi

Awal abad ke-20 ditandai oleh tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai keterbelakangan pribumi dalam berbagai bidang kehidupan, bila dibandingkan dengan status golongan Eropa. Kesadaran emansipasi ini mulai disuarakan oleh Raden Adjeng Kartini sejak akhir abad ke-19. Kesadaran tersebut menemukan momentum ketika sekelompok siswa School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Kwitang mendirikan organisasi Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908, yang oleh Sartono Kartodirdjo disebut sebagai tonggak awal kebangkitan nasional.<sup>41</sup> Beberapa orang Katolik terlibat dalam gerakan kebangkitan nasional, seperti F.S. Harjadi yang menjadi ketua Boedi Oetomo cabang Klaten.<sup>42</sup> Meskipun Boedi Oetomo berhasil memberikan identitas baru bagi gerakan kebangsaan, ruang lingkupnya masih terbatas pada subkultur Jawa dan kalangan priayi. Pada 17 Desember 1927, orang-orang Indonesia yang mulai sadar akan rasa nasionalisme membentuk Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) sebagai bentuk solidaritas dan koordinasi di berbagai organisasi kebangsaan Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Belanda.<sup>43</sup> Namun, organisasi ini dianggap menunjukkan simpati yang kuat terhadap Moskow (Komunisme).<sup>44</sup> Katolik sangat berhati-hati dengan apa pun yang berkaitan dengan komunis.

Jerome Awick, salah satu tenaga misi Serikat Jesuit pada 1929, memberikan respons terhadap gerakan kebangkitan nasional. Menurutnya, gerakan kebangkitan nasional dipicu oleh dominasi asing yang tidak memperhatikan kesejahteraan penduduk asli. Tujuan pendirian BO adalah mendambakan kesetaraan dengan masyarakat Eropa.<sup>45</sup> Namun, kemudian muncul kekuatan-kekuatan ke arah anti-Barat, bahkan anti-Belanda, seperti dibentuknya partai revolusioner Indische Partij (Douwes Dekker, Soewardi) pada 1912. Selain itu, juga berkembang gerakan pan-islamisme dan komunisme.<sup>46</sup> Awick menyimpulkan ada tiga bentuk nasionalisme. Pertama, nasionalisme loyal yang menginginkan kemerdekaan yang lebih besar melalui proses evolusi, tetapi tidak secara langsung. Bentuk nasionalisme ini pada akhirnya menuntut pemisahan politik dan pemisahan diri sepenuhnya dari Belanda. Kedua, nasionalisme komunis yang berupaya mencapai kemerdekaan dari Belanda kapitalis yang dominan. Upaya itu dilaksanakan dengan segala cara yang diperlukan, segera, dan mutlak. Ketiga, nasionalisme pan-Islam menuntut kemerdekaan penuh.<sup>47</sup> Awick memberi catatan secara khusus bahwa

---

<sup>41</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 102.

<sup>42</sup> Mikhael Dua (peny.), "Politik Pergerakan Menuju Kemandirian Bangsa," dalam *Politik Katolik: Politik Kebaikan Bersama*, peny. Mikhael Dua, Febiana R. Kainama, dan Kasdin Sihotang (Jakarta: Obor, 2008), 31.

<sup>43</sup> Amelia Syafitri, "Respon PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) Terhadap Ordonansi Sekolah Liar Di Hindia Belanda (1932-1933)" (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 5-6.

<sup>44</sup> Anonymous, "De Kameleon 'Boedi Oetomo'," *Verbond Nederland En Indië*, 1 Juni 1929, 9.

<sup>45</sup> Jerome Awick, "De Inlandsche Beweging," *St. Claverbond* 42, no. 2 (1930): 3-4.

<sup>46</sup> Awick, "De Inlandsche Beweging," 4.

<sup>47</sup> Awick, "De Inlandsche Beweging," 5-7.

cenderung mengenakan jubah kenabian nasionalis atau Pan-Islam untuk maksud mencapai keinginannya.<sup>48</sup>

## **Bertumbuhnya Aksi Sosial Katolik Jawa pada Awal Abad Ke-20 Muntilan sebagai Pusat Kaderisasi Elite Katolik Jawa**

Di Muntilan, Jawa Tengah, tumbuh benih baru, yaitu kaum cerdas pandai dari anak-anak muda pribumi berkat kerja keras dari Franciscus Georgius Josephus van Lith. Van Lith bersama Petrus Hoevenaars tiba di Semarang pada 2 Maret 1896.<sup>49</sup> Pada Oktober 1897, van Lith mendapatkan izin untuk bekerja di Kedu Muntilan dekat Magelang.<sup>50</sup> Metode kerja Van Lith mendidik sejumlah anak muda Jawa yang diharapkan kelak akan menjadi kelompok elite Jawa Katolik. Untuk itu, Van Lith mempelajari budaya dan sastra Jawa dengan sangat serius. Bahkan, dia mendorong orang Jawa untuk mengembangkan bahasanya sendiri dan sastranya sendiri.<sup>51</sup> Hal ini sangat penting bagi pembentukan identitas para muridnya. Mereka tidak memandang rendah bahasa dan budayanya, tetapi tetap tegak berdiri dengan bangga di atas budaya Jawa. Bahkan, Van Lith memilih untuk mendidik muridnya dengan menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa Melayu, selain bahasa Belanda sebagai media komunikasi utama.<sup>52</sup>

Van Lith memulai karya pendidikan Katolik di Jawa dengan mendirikan sebuah sekolah dasar sederhana yang kemudian berkembang menjadi *Hollandsch Inlandsche Kweekschool*. Sekolah ini berhasil meluluskan empat siswa pertamanya pada 13 November 1911.<sup>53</sup> Dari keempat lulusan tersebut, dua di antaranya—Fransiskus Xaverius Satiman dan R. M. Petrus Darmaseputra<sup>54</sup>—mengajukan diri untuk menjadi imam sehingga menandai langkah awal penting dalam proses pembentukan klerus pribumi. Upaya Van Lith untuk mendidik calon imam dari kalangan pribumi memperoleh legitimasi dan dorongan kuat dari ensiklik Paus Benediktus XV yang dikeluarkan pada 30 November 1919. Dokumen tersebut secara tegas menyerukan perlunya pembentukan klerus pribumi di wilayah misi sehingga memberikan landasan teologis bagi usaha pendidikan Katolik di Hindia Belanda.<sup>55</sup> Dengan demikian, karya Van Lith tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pendidikan umat Katolik Jawa, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan global GKR yang mendorong pribumisasi kepemimpinan rohani di negara-negara misi.

Di tengah-tengah arus pergerakan kebangkitan nasional, dari kalangan anak-anak Jawa yang memperoleh pendidikan Katolik, lahirlah rasa percaya diri sekaligus kesadaran identitas kolektif yang mendorong terbentuknya perjuangan sosial di antara

---

<sup>48</sup> Awick, "De Inlandsche Beweging," 4.

<sup>49</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 188.

<sup>50</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 193.

<sup>51</sup> F. van Lith, *De Politiek van Nederland Ten Opzichte van Nederlandsch-Indië* (Magistratenlaan: L.C.G. Malmberg, 1922), 38.

<sup>52</sup> Karel Steenbrink, *Orang-Orang Katolik Indonesia 1808-1942: Pertumbuhan Yang Spektakuler Dari Minoritas Yang Percaya Diri 1903-1942* (Flores: Ledalero, 2006), 636.

<sup>53</sup> Door L. Weve, "Geschiedkundig Overzicht van de Eerste 25 Jaren," dalam *Java Aan Christus: 25 Jaar Priester-Opleiding 1911-1916 Java-Missie Der Jezuieten* (Nijmegen: Missiebond der Paters Jezuieten, 1936), 2.

<sup>54</sup> Weve, "Geschiedkundig Overzicht van de Eerste 25 Jaren," 3.

<sup>55</sup> Bingem Hoctin, "Inlandsche Priesters," *Onze Missien in Oost En West-Indie Kolonial Missie-Tijdschrift Indische Missie-Vereeniging*, 1921, 46.

mereka. Kesadaran ini tidak hanya tumbuh melalui pendidikan formal, tetapi juga diperkaya oleh dukungan beasiswa serta wadah organisasi sosial Katolik yang mulai bermunculan pada awal abad ke-20. Dengan demikian, pendidikan, beasiswa, dan organisasi sosial Katolik menjadi fondasi utama bagi berkembangnya sikap nasionalisme di kalangan umat Katolik Jawa, sekaligus membuka jalan bagi partisipasi mereka dalam dinamika sosial-politik Indonesia pada masa kolonial.

### **Pembentukan Organisasi Sosial Katolik Jawa**

Organisasi-organisasi ini menjadi wadah strategis bagi umat Katolik pribumi untuk mengartikulasikan aspirasi sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta mengembangkan kapasitas intelektual dan politik yang sebelumnya terbatas oleh dominasi kolonial. Berbagai organisasi sosial tersebut disajikan sebagai berikut.

#### Katolika Wandawa

Embrio organisasi sosial Katolik di Jawa berawal ketika para murid Van Lith mendirikan Katholieke Sociale Bond afdeeling Javaansche Onderwijzers (Persatuan Sosial Guru Katolik Jawa) pada tahun 1913.<sup>56</sup> Organisasi ini mula-mula berfungsi sebagai wadah kebersamaan para guru Katolik Jawa dalam rangka memperkuat solidaritas sosial dan mendukung kegiatan pendidikan berbasis iman Katolik.

Dorongan awal untuk mengorganisasi aksi sosial komunitas Katolik Jawa muncul melalui prakarsa Pastor J.J.H.M. van Rijckevorsel. Upaya ini mula-mula diwujudkan dalam bentuk sebuah asosiasi kecil yang bergerak di bidang sosial dengan anggota terbatas yang seluruhnya berasal dari kalangan guru berstatus guru-bantu. Keterbatasan jumlah anggota tersebut erat kaitannya dengan kondisi pendidikan pada masa itu, sebab Kweekschool di Muntilan baru menghasilkan tenaga pengajar berbahasa Belanda dalam jumlah yang sangat terbatas: empat orang pada tahun 1911, enam orang pada tahun 1912, dan sembilan orang pada tahun 1913.<sup>57</sup> Dengan demikian, embrio organisasi Katolik Jawa lahir dari lingkaran kecil kaum terdidik, yang meski jumlahnya sedikit, telah menandai langkah awal menuju pembentukan komunitas politik dan sosial Katolik yang lebih terstruktur di kemudian hari.

Untuk menopang aktivitas tersebut, pada tahun 1914 diterbitkan majalah bulanan berbahasa Jawa yang bernama *Djawi Seraja*. Majalah itu berperan sebagai media komunikasi dan penyebaran gagasan di kalangan umat Katolik.<sup>58</sup> Kesadaran umat Katolik akan kuatnya pengaruh pers terhadap kehidupan sosial dan keagamaan telah muncul sejak awal abad ke-20. Mereka memahami bahwa media cetak berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk opini publik, memperluas wacana keagamaan, serta memperkuat posisi komunitas Katolik dalam dinamika sosial kolonial.<sup>59</sup>

Seiring perkembangan waktu, organisasi sosial Guru Katolik Jawa mengalami transformasi. Pada tahun 1914, organisasi ini menjadi wadah yang lebih inklusif dan

---

<sup>56</sup> Anonymous, "De Javaansche Katholiek," *De Koerier*, 21 Februari 1936, 5; Anonymous, "De R. K. Kerk in Indonesie," *Katholiek Archief* 6e, no. 19 (1951): 368.

<sup>57</sup> Ny. Soerjo Banaroesid, "Onze Katholieke Javaansche Organisatie's," *De Koerier*, 24 Agustus 1934, 5.

<sup>58</sup> Anonymous, "De Missie in Indonesie," *Katholiek Archief* 4e, no. 8 (1949): 160.

<sup>59</sup> F. Strater, "Javaansche Lector," *De Java Post*, 8 Agustus 1919, 373.

terbuka bagi seluruh umat Katolik di Jawa dengan nama Katholika Wandawa.<sup>60</sup> *Djawi Seraja* terus terbit hingga tahun 1920.<sup>61</sup> Pada 1934, Katholika Wandawa sudah memiliki cabang di 24 tempat.<sup>62</sup>

Tahun 1920 menandai fase penting konsolidasi organisasi Katolik di Jawa. Beberapa organisasi Katolik lokal menyatukan diri dan membentuk Poesara Katolika Wandawa (PKW) sebagai badan pusat organisasi Katolik.<sup>63</sup> Organisasi ini mendapatkan status badan hukum pada tanggal 4 Juni 1926.<sup>64</sup> PKW kemudian menerbitkan majalah *Swara Tama* dengan L. van Rijckevorsel sebagai editor utama.<sup>65</sup> Tujuan pembentukan PKW adalah mendidik, membimbing, dan mengarahkan organisasi-organisasi sosial umat Katolik Jawa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama antarorganisasi di antara mereka.<sup>66</sup> Kepemimpinan PKW dipercayakan kepada seorang tokoh Jawa, Raden Mas B. Djajaendra dari Muntilan.<sup>67</sup> Hal ini mulai menunjukkan keterlibatan aktif kaum pribumi dalam struktur kepemimpinan GKR. *Swara Tama* menjadi media edukasi untuk membangkitkan kesadaran sosial politik di antara orang Katolik Jawa dengan memuat artikel dan berita yang berkaitan dengan peristiwa sosial dan politik yang berkembang pada masanya.<sup>68</sup>

Menurut laporan tahun 1928, seluruh jajaran pengurus PKW telah diisi sepenuhnya oleh tokoh-tokoh Katolik pribumi Jawa. Susunan kepengurusan tersebut terdiri atas A. Soegijapranata sebagai penasihat, R. C. Soegiri sebagai ketua, R. M. P. S. Darmaseputra sebagai sekretaris, M. J. Soekirdja Hardjasoebrata sebagai sekretaris kedua, R. M. B. Djajaéndra sebagai penulis, serta M. Soekatja, G. Endratanaja, dan Rakijaparmaka sebagai anggota komite. Keanggotaan PKW mencakup jaringan Katholika Wandawa dari berbagai daerah di Jawa.<sup>69</sup>

Struktur kepengurusan yang sepenuhnya terdiri atas orang Jawa serta luasnya jaringan organisasi menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam dinamika GKR di Hindia Belanda. Jika sebelumnya kepemimpinan Katolik didominasi oleh aktor Eropa dan Indo, maka pada periode ini mulai tampak proses pribumisasi yang nyata, yakni umat Katolik pribumi mengambil peran aktif dalam kepemimpinan organisasi dan memperluas basis sosialnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa semangat keindonesiaan mulai tumbuh dan meresap ke dalam tubuh GKR pada masa kebangkitan nasional. Organisasi-organisasi Katolik tidak lagi sekadar menjadi perpanjangan tangan

<sup>60</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 264.

<sup>61</sup> Anonymous, "De Missie in Indonesie," 160.

<sup>62</sup> Anonymous, *400 Jaren Missie in Nederlandsch-Indie*, Jubileumnummer van het Maandblad Sociaal Leven (Batavia: Sociaal Leven, 1934), 15e:71.

<sup>63</sup> Anonymous, "Centrale Der Javaansche Katholieke Bonden," *Onze Missien in Oost En West-Indie Kolonial Missie-Tijdschrift Indische Missie-Vereeniging* 6, no. 6 (1923): 412; Anonymous, *400 Jaren Missie in Nederlandsch-Indie*, 15e:70.

<sup>64</sup> Banaroesid, "Onze Katholieke Javaansche Organisatie's," 5.

<sup>65</sup> Anonymous, "Centrale Der Javaansche Katholieke Bonden," 412; Anonymous, *400 Jaren Missie in Nederlandsch-Indie*, 15e:70.

<sup>66</sup> Banaroesid, "Onze Katholieke Javaansche Organisatie's," 5.

<sup>67</sup> Anonymous, "Een Algemeene Boekeninzameling," *Bulletin Der Vereeniging van Den H. Vincentlus van Paulo*, no. 914 (1925): 168.

<sup>68</sup> Anonymous, "Christelijke Bladen," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 17 November 1932, 177.

<sup>69</sup> Anonymous, *Handboekje van de Katholieke*, 82.

misi Barat, melainkan berkembang sebagai wadah sosial-religius yang mencerminkan aspirasi umat Katolik Indonesia dalam konteks nasionalisme yang sedang bertumbuh.

### Poesara Wanita Katolik

Perkembangan organisasi sosial Katolik pada awal abad ke-20 tidak hanya terbatas pada lingkungan laki-laki, tetapi juga meluas ke kalangan perempuan. Hal ini terbukti dengan berdirinya Wanita Katolik pada 9 September 1923 di Yogyakarta yang diinisiasi Ibu Hardjodingrat. Pendirian organisasi ini menandai keterlibatan aktif kaum perempuan Katolik dalam ranah sosial dan pendidikan. Pada awalnya, Wanita Katolik beranggotakan 120 orang.<sup>70</sup> Tujuannya adalah untuk berkontribusi untuk meningkatkan kedudukan perempuan Jawa. Selanjutnya, organisasi ini membentuk wadah koordinatif berupa Poesara Wanita Katolik (PWK) pada 1933 sebagai organisasi yang menjadi payung dari berbagai cabang Wanita Katolik. PWK berfungsi untuk memperkuat jaringan, solidaritas, serta peran perempuan Katolik dalam kehidupan masyarakat.<sup>71</sup> PWK berjuang untuk memberantas buta huruf di kalangan perempuan Jawa, menyelenggarakan kursus batik, dan kerajinan tangan yang bermanfaat dan punya nilai estetika.<sup>72</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa pribumisasi GKR di Jawa tidak hanya menghasilkan pemimpin rohani dan sosial dari kalangan laki-laki, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi perempuan.

Perkembangan organisasi ini menunjukkan dinamika yang signifikan karena pada tahun 1938 telah terbentuk 12 cabang Wanita Katolik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa.<sup>73</sup> Fakta ini menegaskan bahwa perempuan Katolik Jawa tidak hanya berperan dalam lingkup lokal, tetapi juga mampu membangun jaringan organisasi yang luas sehingga memperkuat posisi mereka dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Struktur kepengurusan dan ekspansi cabang organisasi ini mencerminkan pribumisasi, sekaligus peningkatan partisipasi perempuan Katolik pribumi dalam ranah sosial kolonial.

### Muda Katolik Jawa

Pada 1 Agustus 1929 di Yogyakarta, didirikan organisasi umum bagi pemuda Katolik Jawa yang diberi nama Muda Katolik (MK).<sup>74</sup> Organisasi ini dibentuk dengan tujuan utama untuk menghimpun dan menyatukan anak-anak laki-laki serta para katekumen Katolik yang tersebar di berbagai wilayah. Kehadiran organisasi ini segera memperoleh respons positif yang dibuktikan dengan partisipasi lebih dari seratus pemuda yang secara teratur menghadiri pertemuan mingguan setiap hari Minggu setelah Misa Agung.<sup>75</sup>

Para anggota tersebut kemudian terlibat aktif dalam berbagai seksi yang dibentuk di dalam organisasi sehingga Moeda Katolik tidak hanya berfungsi sebagai wadah

---

<sup>70</sup> Anonymous, "De Javaansche Katholiek," 5.

<sup>71</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 309.

<sup>72</sup> F. Oetaja, "Katholiek Java Brieven Ovet Het Inheemsche Katholieke Leven," *Het Huisgezin Roomsche-Katholiek Dagblad Voor Nederland*, 31 Mei 1930, 13.

<sup>73</sup> Anonymous, *Handboekje van de Katholieke*, 83.

<sup>74</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 354.

<sup>75</sup> A. Spekle, "Van de Landen Aan Merapi's Zuidkant," *St. Claverbond* 44, no. 2 (1932): 180.

kebersamaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan iman, solidaritas sosial, dan penguatan identitas Katolik pribumi pada masa kolonial. MK kemudian berkembang dengan pesat di berbagai tempat di Jawa.<sup>76</sup>

Dalam berbagai organisasi Katolik, seni Jawa juga memperoleh ruang ekspresi yang signifikan melalui praktik lagu dan tari tradisional, seni pedalangan, serta bentuk kesenian lainnya.<sup>77</sup> Fakta tersebut menunjukkan adanya penerimaan dan penghargaan yang mendalam terhadap unsur-unsur khas budaya Jawa dalam kehidupan komunitas Katolik. Lebih jauh, partisipasi umat Katolik Jawa tidak terbatas pada bidang seni, melainkan juga merambah sektor ekonomi. Hal ini tercermin dari keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas produktif, seperti pendirian klub tabungan, pengelolaan koperasi, serta perdagangan batik.<sup>78</sup> Dengan demikian, masyarakat Katolik Jawa tidak tertinggal dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain ketika mengembangkan kapasitas ekonomi, sekaligus memperlihatkan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan identitas religius dengan dinamika sosial-budaya dan ekonomi.

### Melahirkan Elite Katolik Jawa Melalui Pendidikan dan Beasiswa

Pada masa kolonial, pendidikan tinggi bagi kaum pribumi masih sangat terbatas. Sistem pendidikan kolonial lebih banyak diarahkan untuk kepentingan administrasi Belanda, sementara akses bagi anak-anak pribumi sering kali terhambat oleh faktor ekonomi maupun diskriminasi sosial. Dalam konteks ini, misi Katolik mempunyai peran strategis dalam kelahiran kaum cerdik pandai di kalangan pribumi. Kaderisasi anak muda pribumi dilakukan dengan cara memberikan akses kepada mereka untuk bisa menempuh pendidikan dan menyediakan beasiswa untuk studi lanjut. Pada 19 Februari 1914, Fransiskus Xaverius Satiman dan R. M. Petrus Darmaseputra, dua orang Jawa pertama, berangkat ke Eropa untuk belajar menjadi imam di Sekolah Apostolik di Turnhout, Belgia yang didanai oleh Misi Jesuit. Ketika pecah Perang Dunia Pertama, mereka pindah ke Nijmegen mengikuti kelas di Kolese Canisius. Pada tanggal 16 Juli 1915, mereka memasuki novisiat para pastor Yesuit di Mariëndaal.<sup>79</sup>

Untuk membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak pribumi supaya mempunyai akses ke pendidikan, pada awal tahun 1919, didirikan Yayasan Van Lith [*Van Lith-fonds*]. Dana yang tersedia digunakan untuk membiayai para katekis, mahasiswa yang membutuhkan, dan memberikan beasiswa terbatas.<sup>80</sup>

Setelah penahbisan imam-imam Jawa pertama dalam Serikat Yesus, muncul harapan akan lahirnya pemimpin rohani dari kalangan umat Katolik pribumi. Seiring dengan itu, mulai dipertimbangkan langkah-langkah konkret untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi mereka. Dalam konteks ini, Yayasan Van Lith berinisiatif memberikan dukungan finansial bagi Misi Katolik di Jawa melalui penggalangan dua jenis dana, yakni dana dukungan dan dana studi. Dana dukungan ditujukan untuk menopang pemeliharaan imam-imam pribumi serta menunjang pelatihan para seminaris

<sup>76</sup> Anonymous, "Vier Eeuwen," *De Indische Courant*, 8 Agustus 1934, 14.

<sup>77</sup> C. v. d. Deijl, "Missienieuws per Luchtpost," *St. Claverbond* 45, no. 2 (1933): 110.

<sup>78</sup> Banaroesid, "Onze Katholieke Javaansche Organisatie's," 5.

<sup>79</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 264.

<sup>80</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 354.

lokal. Sementara itu, dana studi diarahkan untuk membantu pemuda Katolik Jawa yang berbakat agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>81</sup> Upaya ini mencerminkan strategi institusional GKR ketika memperkuat basis kepemimpinan pribumi sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga rohani Eropa.

Pendirian lembaga dana tersebut memperoleh sambutan yang sangat positif dari masyarakat Katolik. Pada tahap awal, jumlah anggota yang mendaftar telah mencapai 240 orang. Dalam kurun waktu satu tahun berikutnya, jumlah tersebut meningkat secara signifikan hingga mencapai 600 anggota.<sup>82</sup> Fakta ini menunjukkan adanya dukungan sosial yang luas terhadap upaya institusional GKR untuk memperkuat basis finansial bagi pengembangan kepemimpinan rohani pribumi serta pendidikan umat Katolik Jawa.

Perkembangan lembaga dana Van Lith sangat signifikan: Para penyumbang berkomitmen untuk menyumbang setidaknya 1% dari pendapatan mereka setiap bulan. Setelah lima tahun berdiri, yayasan ini telah memiliki dana abadi yang patut dikagumi, mengingat bahwa di antara ratusan penyumbang setia, banyak yang hanya memiliki pendapatan minimal. Yayasan Van Lith adalah monumen pengorbanan Katolik masyarakat Jawa.<sup>83</sup>

Akibat keterbatasan sumber daya yang dihadapi Misi Katolik, upaya pendirian sekolah-sekolah pribumi mengalami kemajuan yang relatif lambat. Dalam konteks ini, umat Katolik Jawa mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mendirikan lembaga pendidikan secara mandiri. Pada 1929, Trijasa, sebuah yayasan baru, didirikan sebagai hasil kerja sama tiga organisasi Katolik, yakni Wanita Katolik, Katolika Wandawa, dan PPKD.<sup>84</sup> Pembentukan yayasan ini mencerminkan sinergi kelembagaan dalam komunitas Katolik yang bertujuan memperkuat kemandirian umat Katolik Jawa, khususnya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah Trijasa dirancang berdasarkan prinsip-prinsip nasional dan secara konsisten menempatkan guru pribumi sebagai tenaga pengajar utama. Melalui kolaborasi tersebut, Trijasa berupaya menyediakan sarana dan dukungan yang memungkinkan umat Katolik pribumi mengembangkan kapasitas intelektual dan sosial secara lebih mandiri sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada struktur kolonial maupun dominasi orang Katolik Eropa.<sup>85</sup> Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam dinamika pendidikan Katolik di Jawa. Umat Katolik pribumi tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga tampil sebagai aktor utama dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, pendirian yayasan ini menandai langkah strategis dalam pribumisasi GKR di Jawa serta memperluas peran umat Katolik pribumi dalam ranah pendidikan dan pembangunan masyarakat.

Upaya pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh komunitas Van Lith terbukti tidak sia-sia karena berhasil melahirkan kelompok penting yang berperan dalam perkembangan GKR sekaligus pergerakan nasional di Indonesia. Beberapa tokoh menonjol yang berasal dari lingkungan ini, antara lain Francis Xavier Satiman, yang

---

<sup>81</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 354.

<sup>82</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 354.

<sup>83</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, *400 Jaren Missie in Nederlandsch-Indie*, 15e:71.

<sup>84</sup> Anonymous, "Vier Eeuwen," 14.

<sup>85</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 354.

melanjutkan studi ke Belanda sebagai novisiat Yesuit; Albertus Soegijapranata, yang kemudian ditahbiskan sebagai Uskup Agung Semarang pada tahun 1940; serta Adrianus Djajasepoetra, yang diangkat menjadi Uskup Agung Jakarta pada tahun 1960. Komunitas Van Lith dengan demikian mampu menghasilkan imam-imam pribumi dalam waktu relatif cepat. Selain itu, dua muridnya yang berkiprah sebagai Katolik awam juga memberikan kontribusi signifikan di tingkat nasional, yakni Ignatius Kasimo sebagai tokoh politik Katolik dan W.J.S. Poerwadarminta sebagai pakar bahasa Indonesia.<sup>86</sup> Data historis ini menandai fase awal keterlibatan aktif umat Katolik pribumi dalam ranah politik kolonial dan kehidupan intelektual Indonesia pada pertengahan abad ke-20, yakni suatu ranah yang sebelumnya didominasi oleh orang Katolik Eropa dan Indo. Seperti analisis Artati, "... pria-pria yang terdidik dengan baik dan berpendidikan universitas akan menjadi aset yang tak ternilai bagi perkembangan komunitas Katolik di Jawa dan di seluruh Hindia Belanda."<sup>87</sup>

### **Kesadaran dalam Bidang Politik**

Kesadaran kaum terdidik Katolik Jawa untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak muncul secara terisolasi, melainkan terinspirasi oleh dinamika politik Katolik global dan aktivitas sosial orang Katolik Eropa yang tinggal di Indonesia. Kesadaran ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan kebangkitan nasional. Momentum penting bagi artikulasi kesadaran politik Katolik Jawa terjadi ketika Van Lith menulis artikel berjudul *De Politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië* pada tahun 1922.

### **Teladan Van Lith: Beroposisi Pada Penguasa, Berpihak Pada Pribumi**

Respons GKR terhadap dinamika sosial-politik kolonial menunjukkan karakter yang berbeda dibandingkan dengan tradisi Protestan. Pengalaman oposisi Katolik terhadap kebijakan penguasa, sebagaimana tercermin dalam peran Piotr Skarga di Polandia maupun perlawanan GKR terhadap kebijakan *Kulturkampf* Otto von Bismarck di Jerman, menemukan resonansinya dalam konteks Hindia Belanda. Pola oposisi tersebut diwujudkan melalui sikap GKR yang tidak semata-mata tunduk pada otoritas kolonial, melainkan menegaskan keberpihakannya kepada umat pribumi. Van Lith melalui karya pendidikan dan pastoralnya merepresentasikan orientasi GKR yang berpihak pada kepentingan dan martabat masyarakat pribumi.

Ketika Dewan Rakyat yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Gubernur Jenderal dibentuk di Batavia pada 21 Mei 1918,<sup>88</sup> IKP memiliki satu wakil, yaitu Jos Schmutzer.<sup>89</sup> Ketika Belanda ingin menyusun tata negara baru, pada 18 Desember 1918 dibentuk *Commissie tot Herziening van de Grondslagen der Staatsinrichting van Nederlandsch Indië* (*Herziening-Commissie*). Van Lith diangkat menjadi anggota *Herziening-Commissie*.<sup>90</sup> Sementara itu, pada 30 November 1919, pemimpin tertinggi GKR,

<sup>86</sup> Steenbrink, *Orang-Orang Katolik Indonesia 1808-1942*, 637-38.

<sup>87</sup> Artati, "De Javaansche Katholieken En de Nationale Beweging," *De Tijd*, 25 Januari 1940, 2.

<sup>88</sup> Martinus P. M. Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 4: Pengintegrasian Di Alam Indonesia* (Jakarta: Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1973), 231.

<sup>89</sup> R. Kurris, *Sejarah Seputar Katedral Jakarta* (Jakarta: Obor, 1992), 191.

<sup>90</sup> Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 4: Pengintegrasian Di Alam Indonesia*, 232.

Paus Benediktus XV, mengeluarkan Surat Apostolik *Maximum Illud* yang isinya menolak para misionaris Katolik menjadi alat kotor bagi kolonialisme, “*No, the true missionary is always aware that he is not working as an agent of his country, but as an ambassador of Christ.*”<sup>91</sup>

Dalam konteks perkembangan tersebut, pada 1922 van Lith menulis sebuah artikel yang berjudul *De Politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië* yang isinya kritik terhadap Hindia Belanda dan keberpihakannya pada perjuangan golongan pribumi.<sup>92</sup> Tujuan van Lith menulis artikel tersebut adalah untuk memengaruhi kebijakan politik *Roomsche Katholieke Staatspartij* di Belanda yang berkaitan dengan ketertiban hukum baru di Hindia Belanda.<sup>93</sup> Keberpihakan van Lith kepada pribumi tampak dalam kalimat, “Semua orang sekarang tahu bahwa kami para misionaris ingin bertindak sebagai mediator; tetapi juga, jika tiba-tiba terjadi keretakan dan kami terpaksa memihak, kami akan berdiri di pihak pribumi.”<sup>94</sup> Meskipun sebenarnya jika mempertimbangkan keuntungan, berpihak pada Belanda jauh lebih menguntungkan bagi misi Katolik.<sup>95</sup> Keberpihakan pada pribumi tidak didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi, tetapi didasarkan pada cita-cita tentang kehidupan: cita-cita Kristen tentang persaudaraan universal semua orang, ras, dan kasih universal Kristiani.<sup>96</sup> Bahkan, van Lith mengkritik sistem pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung menindas dan merendahkan martabat penduduk pribumi.<sup>97</sup> Van Lith berharap bahwa pemerintah Hindia Belanda menerapkan prinsip kesetaraan pada penduduk pribumi karena hal tersebut punya landasan teologis yang kuat.

Akui hak-hak penduduk asli, jika Anda ingin melihat hak-hak Anda sendiri diakui dalam jangka panjang. ... Di dalam Gereja Kristus tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Romawi, tidak ada orang Yunani, dan dengan demikian tidak ada orang Belanda dan tidak ada orang Jawa, dan apa yang menjadi hukum di dalam Gereja sejak semula, sekarang dijadikan hukum juga di luar Gereja: orang Belanda, orang Indo, dan orang Jawa selanjutnya akan hidup bersama sebagai saudara, atau kalau tidak, mereka tidak akan hidup bersama sama sekali.<sup>98</sup> Van Lith menempuh jalan yang berseberangan dengan penguasa meskipun mengandung risiko yang harus ditanggungnya. Rekan kerja van Lith yang berasal dari Belanda, Ten Berge, tidak menyetujui pandangan van Lith.<sup>99</sup> Menurut Heuken, sejarawan Yesuit, “Penyebaran cetakan khusus karangan ini dihentikan dan sisanya yang masih banyak itu dijual sebagai kertas loakan.”<sup>100</sup> Artikel tersebut mengakibatkan keresahan. Ketika van Lith sakit dan pulang ke Belanda, beberapa pater berpendapat van Lith sebaiknya tidak pulang ke Jawa.<sup>101</sup> Dalam ingatan Michael Slamet yang pernah bersekolah di Muntilan dari 1915-1925, akibat artikel tersebut van Lith “sempat ditugaskan ke Filipina.”<sup>102</sup>

<sup>91</sup> Adolf Heuken, “Kemerdekaan: Harapan Umat Katolik Di Indonesia,” *Orientasi Baru*, no. 9 (1995): 16.

<sup>92</sup> van Lith, *De Politiek*.

<sup>93</sup> Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 4: Pengintegrasian Di Alam Indonesia*, 583.

<sup>94</sup> van Lith, *De Politiek*, 39.

<sup>95</sup> van Lith, *De Politiek*, 8.

<sup>96</sup> van Lith, *De Politiek*, 40.

<sup>97</sup> van Lith, *De Politiek*, 9.

<sup>98</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. van Lith, *De Politiek*, 41.

<sup>99</sup> Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 4: Pengintegrasian Di Alam Indonesia*, 240.

<sup>100</sup> Adolf Heuken, *150 Tahun Serikat Jesus Berkarya Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2009), 209.

<sup>101</sup> Heuken, *150 Tahun Serikat Jesus Berkarya Di Indonesia*, 209.

<sup>102</sup> Michael Slamet, “Yang Kuingat Dari Sekolah Jesuit Muntilan,” dalam *Harta Dan Surga: Pesiarahan Jesuit Dalam Gereja Dan Bangsa Indonesia Modern*, peny. A. Budi Susanto (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 39.

Tulisan van Lith bukan hanya menginspirasi anak-anak muda Katolik, tetapi juga menginspirasi tokoh nasionalis seperti Sukarno. Dalam pidato pembelaannya di Landraad Bandung pada 18 Agustus 1930, dia mengutip tulisan van Lith dengan menyebutnya sebagai “Pastor Van Lith, orang alim yang tulus hati itu, belum lama berselang di dalam buku kecilnya yang termashur....”<sup>103</sup>

Tulisan van Lith menjadi salah satu rujukan moral-politik penting yang menstimulus bangkitnya partisipasi Katolik Jawa dalam politik kolonial. Tentu hal tersebut menjadi mungkin karena berkat pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak muda Katolik di *Kwekschool* Muntilan. Van Niel memperkirakan bahwa mayoritas (98%) orang Jawa adalah rakyat jelata pada 1900.<sup>104</sup> Artinya, van Lith telah memberikan sumbangan yang penting bagi munculnya kelompok elite baru di lingkungan Katolik Jawa. Meskipun jumlahnya kecil, kelompok elite yang baru tersebut, meminjam istilah Mills, telah menjadi *small elite power groups* yang berpengaruh penting dalam memberikan arah bagi partisipasi politik orang Katolik Jawa.<sup>105</sup>

### Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD)

Kesadaran untuk terlibat dalam perhelatan gerakan nasionalis di antara umat Katolik Jawa sudah mulai terbentuk sejak awal abad ke-20. Mereka mempunyai keyakinan tentang kebenaran dari sebuah pepatah, “Jika mereka tidak terlibat dalam politik, politik akan terlibat dalam diri mereka.”<sup>106</sup> Menurut Oetaja, sebelum terbentuknya PPKD, cukup banyak umat Katolik Jawa yang sudah terdaftar sebagai anggota Boedi-Oetomo.<sup>107</sup>

Pengaruh tulisan van Lith tampak ketika pada 1922 R.M.J. Soejadi (dokter hewan) menginisiasi sebuah komite pendiri asosiasi politik orang Katolik Jawa.<sup>108</sup> Gagasan Soejadi mendapat respons yang baik. Pada Juni 1923, Leopold van Rijckevorsel<sup>109</sup> mendukung pembentukan paguyuban sejenis IKP untuk orang-orang Jawa di Muntilan.<sup>110</sup> Menurut Oetaja, pada tanggal 5 Agustus 1923, lima puluh orang Jawa Katolik berkumpul di Yogyakarta untuk mengadopsi usulan pembentukan cabang Partai Indo-Katolik bagi orang Jawa. Hal itu dikarenakan IKP yang pada awalnya didirikan sebagai wadah organisasi bagi semua organisasi lokal untuk aksi politik dan semua bangsa, tetapi secara praktis anggotanya hanya terdiri dari orang Eropa. Untuk sementara, Katholieke Javanen Vereeniging voor Politieke Actie (KJVPA) tergabung

<sup>103</sup> Sukarno, *Indonesia Menggugat* (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1969), 123.

<sup>104</sup> Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 30.

<sup>105</sup> C. Wright Mills, *The Power Elite* (Oxford: Oxford University Press, 1990).

<sup>106</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. F. Oetaja, “Katholiek Java,” *Het Huisgezin Roomsche-Katholiek Dagblad Voor Nederland*, 8 September 1930, 16.

<sup>107</sup> Oetaja, “Katholiek Java,” 16.

<sup>108</sup> Anonymous, “De Javaansche Katholiek,” 5. Keinginan Soejadi untuk mendirikan partai politik Katolik sudah tumbuh sejak awal 1920an. Hal ini dinyatakan dalam kata sambutan buku peringatan ke-20 tahun IKP, “Ketika saya bekerja di Surabaya sekitar 18 tahun yang lalu dan mulai tertarik pada isu-isu politik, saya juga mempertimbangkan apakah mungkin bagi umat Katolik Jawa untuk mengorganisir diri secara politik.” [Het Hoofdbestuur der Indische Katholieke Partij, *Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd Orgaan van de Indische Katholieke Partij 1918-1938* (Batavia: IKP, 1938), 14.]

<sup>109</sup> Leopold van Rijckevorsel adik J.H.M van Rijckevorsel (Jan) sangat dipengaruhi oleh ensiklik sosial Paus Leo XIII. Paus Leo XIII, “*Rerum Novarum*”; Jan aktif membentuk *Katholieke Sociale Bond* (KSB) di Batavia. Gerry van Klinken, *5 Penggerak Bangsa Yang Terlupa; Nasionalisme Minoritas Kristen* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 78–79.

<sup>110</sup> Steenbrink, *Orang-Orang Katolik Indonesia 1808-1942*, 88.

dalam IKP.<sup>111</sup> Hal ini diberitakan dalam *Swara Tama* 13 Agustus 1923 bahwa orang-orang Jawa Katolik telah mendirikan KJVPA (Asosiasi Aksi Politik Katolik Jawa).<sup>112</sup>

Eksistensi KJVPA segera memperoleh pengakuan dari kalangan Katolik Eropa. Hal ini tampak jelas dalam konferensi IKP yang diselenggarakan pada 22–23 September 1923 di Bandung yang dihadiri oleh perwakilan dari Katholieke Vereenigen voor Politieke Actie dengan afiliasi di Batavia, Bogor, Sukabumi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Meskipun tidak secara resmi, panitia konferensi tetap mengundang seorang perwakilan dari Asosiasi Aksi Politik Katolik Jawa sehingga memperlihatkan adanya keterbukaan terhadap partisipasi politik pribumi. Lebih jauh, sejumlah tokoh pribumi, seperti R.M.J. Soejadi, R.M.R. Winatasastra, F. Soetrisna, dan C. Pranata, bahkan dicalonkan sebagai anggota Dewan Rakyat bersama dengan kandidat Eropa.<sup>113</sup> Ketua, sekretaris, dan bendahara KJVPA diterima menjadi anggota IKP.<sup>114</sup>

Selain itu, keterlibatan orang Jawa juga semakin nyata melalui partisipasi mereka dalam sebuah komisi yang dibentuk untuk mempelajari reorganisasi IKP.<sup>115</sup> Fakta ini menandai pergeseran penting dalam dinamika politik Katolik kolonial bahwa umat Katolik pribumi tidak lagi sekadar menjadi objek, melainkan mulai tampil sebagai subjek politik yang aktif. Dengan demikian, KJVPA berperan sebagai wadah awal bagi konsolidasi politik Katolik Jawa, sekaligus memperlihatkan pribumisasi yang menggeser dominasi Eropa menuju partisipasi pribumi dalam ranah politik kolonial.

### **Pengurus PPKD Menjadi Anggota Volksraad**

KJVPA kemudian menggunakan nama dalam bahasa Jawa, Pakempalan Politiek Katholiek Djawi (PPKD). Dalam majalah *Swaratama* 15 Desember 1923 No. 31, terdapat pengumuman dari pengurus PPKD bahwa akan diadakan konferensi pada tanggal 25 Desember di pastoran Muntilan untuk membahas: pertama, perlunya umat Katolik Jawa untuk berpartisipasi dalam politik, dan kedua, posisi asosiasi tersebut.<sup>116</sup> Koran *De Java Post* pada 8 Februari 1924 juga memberitakan bahwa di Muntilan didirikan sebuah asosiasi, yaitu Pakempalan Politiek Katholiek Djawi. Asosiasi ini akan berkedudukan di Djokja, Jawa, dan sebagaimana dapat disimpulkan dari namanya, akan bersifat Katolik dalam kegiatannya.<sup>117</sup> Asosiasi ini juga bersifat nasional Jawa, anti-revolusioner, dan religius Katolik. Asosiasi ini akan berupaya menjalin kerja sama dengan asosiasi Katolik Eropa dan organisasi Katolik pribumi lainnya.<sup>118</sup>

Eksistensi PPKD dengan cepat memperoleh perhatian dan pengakuan dari pemerintah kolonial. Hal ini dibuktikan melalui pemberitaan dalam *Het Nieuwsblad van Het Zuiden* tanggal 5 April 1924, yang mencatat bahwa ketika *Volksraad* (Dewan Rakyat) dibentuk, pemerintah turut memilih seorang Katolik Jawa, Soejadi (pengurus PPKD),

<sup>111</sup> Oetaja, "Katholiek Java," 16.

<sup>112</sup> Anonymous, "Javanen Bond," *De Java Post*, 31 Agustus 1923, 243.

<sup>113</sup> Anonymous, "Algemeen Overzicht," *De Java Post*, 28 September 1923, 469.

<sup>114</sup> Het Hoofdbestuur der Indische Katholieke Partij, *Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd Orgaan van de Indische Katholieke Partij 1918-1938*, 25.

<sup>115</sup> Anonymous, "Algemeen Overzicht," 469.

<sup>116</sup> Anonymous, "Swaratama 15 December 1923 No. 31," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, no. 51 (1923): 592.

<sup>117</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "Algemeen Overzicht," *De Java Post*, 8 Februari 1924, 64.

<sup>118</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "Javaansche Katholieken," *De Tijd*, 4 Maret 1924, 7.

sebagai anggota lembaga tersebut.<sup>119</sup> Keterlibatan Soejadi menandai langkah penting dalam representasi politik umat Katolik pribumi, sekaligus menunjukkan bahwa PPKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah konsolidasi internal, tetapi juga berhasil menembus struktur politik resmi kolonial.

Seperti yang diberitakan dalam *Hindia Baroe* 31 Juli 1924, Umat Katolik Jawa menyambut dengan perasaan senang dan bersyukur kepada pemerintah karena mereka memiliki perwakilan di Dewan Rakyat.<sup>120</sup> Sebaliknya, seorang penulis Islam memberikan kritik terhadap pengangkatan pengurus PPKD dalam Volksraad. PPKD dilihat akan menjadi pesaing utama bagi umat Islam di Jawa. Di balik slogan yang memperjuangkan kemerdekaan rakyat, penulis tersebut menengarai maksud PPKD untuk mengonversi orang Jawa menjadi Katolik. Sentimen penulis tampak dalam pelesetan singkatan organisasi tersebut. Alih-alih merujuk pada arti sebenarnya, yakni Pakempalan Politiek Katholiek Djawi, singkatan PPKD dipelesetkan menjadi Pergerakan Penindes Kemadjoean Djaman.<sup>121</sup> Pelesetan ini mencerminkan sikap resistensi terhadap eksistensi politik Katolik Jawa. PPKD dikhawatirkan berfungsi sebagai wadah yang menyembunyikan kepentingan kolonial di balik penggunaan nama-nama Jawa sehingga secara substantif lebih merepresentasikan organisasi orang Belanda daripada aspirasi lokal. Penulis tersebut menegaskan Muhammadiyah harus melawan ini.<sup>122</sup>

### **Kemandirian PPKD dari IKP: Melepaskan Diri dari Bayang-bayang Eropa**

Keinginan PPKD untuk memisahkan diri dari asosiasi politik Katolik Eropa IKP sudah muncul sejak awal pendiriannya. Pada konferensi IKP di Bandung, 23 September 1923, ketika ada usaha untuk menggabungkan semua organisasi politik dalam satu wadah sehingga organisasi-organisasi yang tersebar di berbagai kota menjadi cabang. Umat Katolik Jawa mengajukan keberatan. Soejadi mengatakan dengan tegas,

Niat orang Jawa adalah untuk membentuk sebuah perkumpulan terpisah dan independen, yang dapat mengurus urusannya sendiri dalam kerangka prinsip-prinsip Katolik umum. Mereka merasa lebih nyaman di antara mereka sendiri, sebagian besar tidak mengerti bahasa Belanda, dan mereka ingin menghindari tuduhan dari orang Jawa yang lain bahwa mereka mengikuti jejak orang Eropa.<sup>123</sup>

Pertemuan tersebut tidak mencapai kata sepakat. Mereka berencana membentuk komite reorganisasi lembaga. Pada tanggal 3 Februari 1924 diadakan pertemuan eksekutif partai dan juga dibuat rancangan amandemen terhadap Anggaran Dasar dan Peraturan Prosedur. Namun, tampaknya rencana reorganisasi asosiasi tidak mencapai kata sepakat. Umat Katolik Jawa meminta agar mereka tetap menjadi entitas politik yang

---

<sup>119</sup> Anonymous, "Van Hier En Daar," *Het Nieuwsblad van Het Zuiden*, 5 April 1924, 5.

<sup>120</sup> Anonymous, "Uit de Maleisch-Javaansch-Soendaneesche Pers," *Mededeelingen Tijdschrift Voor Zendingwetenschap*, no. 68 (1924): 361.

<sup>121</sup> Anonymous, "Godsdienstige Bladen Bintang Islam Van 10 April 1924 No. 7," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 1924, 139.

<sup>122</sup> Anonymous, "Godsdienstige Bladen Bintang Islam Van 10 April 1924 No. 7," 139.

<sup>123</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. *Het Hoofdbestuur der Indische Katholieke Partij, Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd Orgaan van de Indische Katholieke Partij 1918-1938*, 25.

terpisah dan independen.<sup>124</sup>

Situasi berubah. Dalam peraturan Pemilu tahun 1925, pemilih dibagi menjadi tiga kelompok: orang Eropa, orang Timur Jauh, dan pribumi. Setiap kelompok pemilih hanya diperbolehkan untuk memilih kandidat dari kelompok mereka sendiri. Dengan begitu, warga Katolik Jawa tidak ada untungnya untuk tetap berafiliasi dengan IKP. Atas dasar situasi tersebut, kemudian mereka secara resmi membentuk Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD).<sup>125</sup> Susunan pengurus PPKD terdiri dari orang Jawa. Ketua F.S. Harjadi, I.J. Kasimo sebagai sekretaris, dan R.M. Jakob Soedjadi sebagai bendahara.<sup>126</sup> Pada 22 Februari 1925, Anggaran Dasar disetujui oleh rapat umum. Berikut merupakan Prinsip PPKD:

1. Asosiasi PPKD menganut prinsip-prinsip Katolik dan mengakui bahwa perlu diperhitungkan fakta bahwa Hindia adalah negara dengan mayoritas penduduk non-Katolik.
2. Dalam upayanya, ia selalu berpegang pada prinsip evolusi dan kerja sama.
3. Ia menyatakan bahwa semua kegiatan warga yang memiliki konten konstruktif harus didorong dan didukung.<sup>127</sup>

Pada 2 Mei 1925, IKP mengalami reorganisasi menjadi satu organisasi sehingga Asosiasi Aksi Politik Katolik di daerah-daerah dibubarkan dan menjadi cabang. PPKD ditempatkan sejajar dengan IKP.<sup>128</sup> *Swaratama* Januari/Februari 1926 memberitakan bahwa PPKD telah mendapatkan status badan hukum.<sup>129</sup>

### **Katolik Jawa dan Nasionalisme: Prinsip Kita Haruslah Katolik dan Nasional**

Realitas historis bahwa tradisi Katolik memiliki kedekatan erat dengan Eropa menjadikan umat Katolik Jawa sering dicurigai oleh rekan sebangsanya sebagai bagian dari kolonialisme. Kecurigaan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga menyentuh dimensi politik dan identitas kebangsaan. Di tengah atmosfer penuh prasangka tersebut, sejumlah tokoh Katolik Jawa berupaya memberikan apologia melalui tulisan. Upaya apologetik ini sekaligus menjadi strategi intelektual untuk membangun ruang dialog, memperkuat legitimasi keberadaan komunitas Katolik Jawa, dan mereduksi stigma kolonial yang melekat pada identitas mereka.

Sebuah artikel berjudul *Ons Principe* (Prinsip Kami) yang ditulis oleh C. Poeloengana dari Jong Java Muntilan diterbitkan ulang dalam koran *De Java Post* 25 September 1925 dan koran *De Locomotief* 30 September 1925.<sup>130</sup> Poeloengana membuka tulisannya dengan identitas pribadinya yang dikaitkan dengan rasa kebangsaannya. Berikut adalah bunyi teks lengkapnya:

---

<sup>124</sup> Het Hoofdbestuur der Indische Katholieke Partij, *Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd Orgaan van de Indische Katholieke Partij 1918-1938*, 26.

<sup>125</sup> Anonymous, "De Javaansche Katholiek," 5; Het Hoofdbestuur der Indische Katholieke Partij, *Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd Orgaan van de Indische Katholieke Partij 1918-1938*, 26; Anonymous, "De R. K. Kerk in Indonesie," 370.

<sup>126</sup> Tim Wartawan Kompas, *I.J. Kasimo Hidup Dan Perjuangannya* (Jakarta: PT Gramedia, 1980), 23.

<sup>127</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "De Javaansche Katholiek," 5.

<sup>128</sup> Anonymous, "Reorganisatie Der Ind. Katholieke Partij," *Het Vaderland*, 2 Mei 1925, 7.

<sup>129</sup> Anonymous, "Swaratama Van Januari/Februari 1926, Nrs. 1/9.," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 1926, 531.

<sup>130</sup> Anonymous, "Katholieke Javanen En Het Nationalisme," *De Locomotief*, 30 September 1925, 1.

Sebelum saya mulai, saya harus terlebih dahulu menyatakan bahwa saya seorang Katolik, bukan Protestan, dan bahwa prinsip-prinsip yang ingin saya jelaskan di sini adalah prinsip-prinsip Katolik. Ya, saya seorang Katolik Kristen. Tetapi itu tidak berarti—seperti yang sering orang sebutkan tentang kami— seorang pria yang terpisah dari bangsanya sendiri. Tidak! Menjadi Katolik bukan berarti bersekongkol dengan "Pihak Sana" dan menghambat kemajuan negara dan rakyatnya demi kepentingan Belanda. Menjadi Katolik tidak berarti, seperti yang banyak orang sangka! Bahkan kaum intelektual pun dengan blak-blakan mengklaim bahwa kami berhenti menjadi orang Jawa. Menjadi seorang Katolik bukan berarti memadamkan perasaan nasionalisme kami untuk menggunakan senjata di pihak asing melawan rakyat dan tanah air kita sendiri. Tidak! Semua ini hanyalah prasangka absurd yang tidak memiliki dasar apa pun. Kami tentu saja mengenal nasionalisme, dan kami juga mempraktikkannya sebaik mungkin.<sup>131</sup>

Poeloengana menegaskan bahwa prinsip tersebut juga seirama dengan prinsip yang selalu ditekankan oleh ketua PPKD, "Prinsip kita haruslah: Katolik dan Nasional. Katolik, karena kita adalah umat Katolik. Nasional, karena kita adalah orang Jawa, yang tidak ingin tertinggal dari sesama orang Jawa dalam cinta dan pengorbanan untuk negara kita."<sup>132</sup>

### **Sikap Kritis PPKD terhadap Kebijakan Penguasa**

Konsistensi Katolik Jawa untuk berpihak kepada bangsanya dibuktikan dengan sikapnya yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintahan kolonial yang merugikan masyarakat pribumi. Setidaknya, terdapat dua kebijakan pemerintah kolonial yang ditentang oleh PPKD. Pertama, rencana penguasaan bahasa Belanda sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat Sarjana di Sekolah Tinggi Pelatihan Guru Umum. Persyaratan ini dianggap tidak adil oleh PPKD. Begitu juga, mereka menolak persyaratan itu bagi para guru yang akan ditugaskan ke *Hollandsch-Inlandsche School H.I.S.* Kedua, PPKD berupaya untuk mereformasi sistem pemilihan untuk dewan kota. Mereka menentang penggolongan ras dalam daftar pemilih (Eropa, Pribumi, Oriental Asing) karena dianggap merugikan penduduk asli. Untuk memperjuangkan tuntutan tersebut, PPKD meminta R. M. J. Soejadi, anggota *Volksraad*, untuk berkonsultasi dengan anggota Katolik Roma lainnya di *Volksraad*.<sup>133</sup>

### **Dari Katolik Jawa Menjadi Katolik di Jawa**

Setelah momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, benih nasionalisme di kalangan Katolik Jawa memang bertumbuh perlahan, tetapi menunjukkan arah perkembangan yang menjanjikan. Mereka ingin membentuk partai politik yang bisa mewadahi masyarakat pribumi Katolik yang berasal dari luar Jawa dengan keinginan untuk mengubah nama PPKD menjadi SPKI (*Sarekat Politiek Katholiek Indonesia*) pada kongres PPKD yang diadakan di Yogyakarta pada 28 dan 29 Juni 1930. Perubahan nama ini dianggap perlu karena organisasi tersebut akan mencakup tidak hanya orang Jawa, tetapi juga orang-orang dari etnis lain.<sup>134</sup> Namun, rencana tersebut tidak disetujui oleh

---

<sup>131</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "Katholicisme En Javanisme," *De Java Post*, 25 September 1925, 498.

<sup>132</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "Katholicisme En Javanisme," 498.

<sup>133</sup> Anonymous, "Hoofdbestuursvergadering van Pakempalan Politiek Katholiek Djawi," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, no. 42 (1925): 138–39.

<sup>134</sup> Anonymous, "Naamsverandering," *De Koerier*, 30 Juni 1930, 2.

sebagian besar anggota<sup>135</sup> sehingga rapat anggota PPKD 29 Juni 1930 memutuskan agar anggaran dasar diubah untuk memungkinkan semua warga negara Indonesia menjadi anggota.<sup>136</sup> Namanya tetap PPKD, tetapi kepanjangannya menjadi Perkoempoelan Politiek Katholiek di Djawa.<sup>137</sup> Penambahan kata *di* mengandung makna bahwa PPKD bukan hanya untuk orang Jawa, tetapi juga sebagai penegasan bahwa PPKD adalah wadah perkumpulan politik Katolik yang keberadaannya ada di Jawa. Artinya, partai ini terbuka bagi masyarakat Katolik yang berasal dari luar suku Jawa.<sup>138</sup>

Kemajuan politik Katolik Jawa sesuai Kongres semakin nyata ketika Kasimo, tokoh PPKD, berhasil duduk sebagai anggota Volksraad (Dewan Rakyat) pada 15 Juni 1931. Pencapaian itu signifikan karena PPKD tidak punya perwakilan di Volksraad sejak 1927.<sup>139</sup> Persetujuan Gouvernements Besluit atas perubahan anggaran dasar dari Pakempalan Politiek Katholiek Djawi menjadi Perkoempoelan Politiek Katholiek di Djawa memperkuat legitimasi organisasi ini sebagai wadah resmi perjuangan politik kaum Katolik yang berkedudukan di Jawa.<sup>140</sup>

Tidak berhenti pada ranah kelembagaan, upaya penguatan kapasitas intelektual juga dilakukan. Pada 17 Januari 1932, J.J. van Rijckevorsel memprakarsai kursus mingguan di Yogyakarta mengenai filsafat politik dan ilmu negara yang diikuti oleh sekitar sepuluh peserta.<sup>141</sup> Inisiatif pendidikan ini bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sebuah strategi untuk membentuk kerangka konseptual dan etos kebangsaan sehingga kaum terpelajar Katolik Jawa dapat berpartisipasi secara lebih matang dan berwibawa dalam dinamika politik nasional yang tengah bertumbuh.

### Kasimo Melanjutkan Oposisi Van Lith

Jalan yang berseberangan dengan kekuasaan yang ditempuh Van Lith diteruskan oleh muridnya, yaitu Kasimo. Pada 19 Juli 1932, Kasimo menggemparkan sidang Volksraad dengan pernyataannya yang tegas bahwa Indonesia sebagai bangsa berhak untuk menetapkan nasibnya sendiri. Adapun sebagian bunyi pidato tersebut sebagai berikut,

Tuan Ketua! Dengan ini saya menyatakan bahwa suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda, menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa, dan karenanya berhak memperjuangkan pengaturan negara sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa sesuai dengan kebutuhan nasional, yaitu sesempurna mungkin.

Ini berarti bahwa negeri Belanda sebagai negara berbudaya yang terpanggil mempunyai kewajiban untuk ikut mengembangkan seluruh rakyat, dan khususnya sebagai negara penjajah, mempunyai kewajiban untuk membimbing dan merampungkan pendidikan rakyat, sehingga dengan demikian dapat dicapai

---

<sup>135</sup> Anonymous, "Midden Java Bladen," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 1 Januari 1930, 41.

<sup>136</sup> Oetaja, "Katholiek Java," 1.

<sup>137</sup> Oetaja, "Katholiek Java," 1.

<sup>138</sup> Anonymous, "Midden Java Bladen," 31.

<sup>139</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 366.

<sup>140</sup> Anonymous, "P.P.K.D.," *De Locomotief*, 13 Juni 1932, 1; Anonymous, "Bij Gouv. Besluit," *De Sumatra Post*, 28 Juni 1932, 11.

<sup>141</sup> van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht*, 377; C. v. d. Deijl, "Missienieuws per Luchtpost," 109.

kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kemudian dapat diberikan hak untuk mengatur dan akhirnya memerintah negara sendiri.<sup>142</sup>

### PPKD Meluaskan Pengaruhnya

Dari 29 April sampai 1 Mei 1933, PPKD mengadakan kongres di Solo yang dihadiri oleh perwakilan 31 cabang.<sup>143</sup> Pada kongres tersebut diputuskan pengurus PPKD sebagai berikut: Ketua: Kasimo; Wakil Ketua: Soemodisastro; Sekretaris Pertama: Harjati; Sekretaris Kedua: Bremani; dan Bendahara: Djojo Oetomo. Kantor pusat kepengurusan akan dipindahkan dari Yogyakarta ke Solo.<sup>144</sup> PPKD terus berkembang menjadi sebuah asosiasi besar dengan 36 cabang, 23 di antaranya berada di Vikariat Batavia.<sup>145</sup>

Umat Katolik Jawa sudah terwakili di beberapa dewan lokal. Bahkan, ada perwakilan yang duduk di Dewan Rakyat. Majalah PPKD bernama *Soeara Katholiek* yang berani membela kepentingan umat Katolik Jawa.<sup>146</sup>

### Dari Katolik di Djawa Menjadi Katolik Indonesia

Kesadaran Katolik Jawa untuk bergabung ke dalam gerakan nasionalisme semakin menguat. Ketua PPKD dalam pidatonya, yang dimuat dalam *Aksi* 9 April 1931, menyatakan bahwa partainya adalah kawan seperjuangan menuju satu tujuan, yaitu Indonesia Raja atau Indonesia Merdeka. PPKD meyakini bahwa mereka tidak dapat tetap netral dan harus terjun ke dalam perjuangan nasional. PPKD menyadari jika mereka yang menentang gerakan nasionalisme dan takut akan politik, maka politik akan berbalik menghancurkan mereka.<sup>147</sup> Kesadaran nasionalis terus berkembang ketika kongres ke-10 tahun 1935 mengganti nama PPKD menjadi Persatoean Politiek Katholiek Indonesia (PPKI).<sup>148</sup> PPKD bertransformasi menjadi partai yang terbuka di seluruh wilayah yurisdiksi di Hindia Belanda.<sup>149</sup> PPKD menjadi satu-satunya partai politik universal untuk umat Katolik pribumi.<sup>150</sup> *Katholiek Archief 6e* mencatat bahwa PPKD pada awalnya bersifat nasional Jawa, kemudian menjadi nasional Indonesia.<sup>151</sup> Jadi, tidak berlebihan bagi kita untuk menyetujui pernyataan Jan Bank, "... sekolah Katolik Muntilan adalah asal muasal kesadaran nasional di kalangan kaum Katolik Indonesia."<sup>152</sup>

Perubahan nama menjadi PPKI pada dekade 1930-an membawa implikasi yang signifikan terhadap ekspansi organisasi. Pada tahun 1941, PPKI mempunyai 41 cabang dengan perkembangan penting berupa hadirnya cabang di luar Jawa, yaitu di Medan

<sup>142</sup> Tim Wartawan Kompas, *I. J. Kasimo Hidup Dan Perjuangannya*, 38.

<sup>143</sup> Anonymous, "Het Congres van de P.P.K.D. Te Solo," *De Locomotief*, 3 Mei 1933, 7.

<sup>144</sup> Anonymous, "Het Congres van de P.P.K.D. Te Solo," 7.

<sup>145</sup> Anonymous, *400 Jaren Missie in Nederlandsch-Indie*, 15e:72.

<sup>146</sup> Anonymous, "Vier Eeuwen," 14.

<sup>147</sup> Anonymous, "Midden-Java-Bladen," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, no. 16 (April 1931): 110.

<sup>148</sup> Anonymous, "De Javaansche Katholiek," 5.

<sup>149</sup> Anonymous, "De Javaansche Katholiek," 7.

<sup>150</sup> Het Hoofdbestuur der Indische Katholieke Partij, *Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd Orgaan van de Indische Katholieke Partij 1918-1938*, 26.

<sup>151</sup> Anonymous, "De R. K. Kerk in Indonesie," 370.

<sup>152</sup> Daniel Dhakidae (peny.), "Simfoni Tiada Henti: Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia," dalam *Frans Seda Simfoni Tanpa Henti Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia*, peny. Daniel Dhakidae, K. Bertens, dan Frans M. Parera (Jakarta: Grasindo, 1992), xxv–xlvii.

dan Ujung Pandang.<sup>153</sup>

Pada prinsipnya, kaum muda Katolik Jawa memandang kebangkitan nasional secara positif:

Bagi kaum muda Katolik Jawa yang terdidik, gerakan nasional ini sangat menarik dalam banyak hal. Mereka melihatnya sebagai kebangkitan umum dari lapisan atas masyarakat Jawa. Dan dapat dimengerti bahwa seorang pribumi, terlepas dari agama dan keyakinan, yang telah mengalami perkembangan dan mengenal metode pendidikan modern, akan terbawa oleh gerakan ini. Ia menganggapnya sebagai kewajiban terhadap tanah airnya untuk ikut serta. Siapa yang menahan diri dari partisipasi segera dicap sebagai bukan warga negara yang baik dan sebagai pengkhianat terhadap kewajiban terhadap sesama bangsanya.<sup>154</sup>

Cara yang ditempuh PPKI ketika memperjuangkan bangsanya adalah penyampaian aspirasi melalui wakilnya di Dewan Rakyat dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa Katolik Jawa setidaknya sama patriotiknya dengan sesama warga negara non-Katolik.

Setelah Sumpah Pemuda 1928, PPKD semakin menunjukkan keterlibatan aktif dalam dinamika politik kolonial dengan sikap kritis terhadap kebijakan penguasa. Salah satu manifestasi nyata dari keterlibatan tersebut tampak pada 18 Februari 1930 ketika PPKD mendukung keputusan rapat umum Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang menentang rencana pengalihan urusan pendidikan kepada Dewan Lokal.<sup>155</sup> Dukungan ini tidak hanya mencerminkan solidaritas PPKD dengan kalangan guru, tetapi juga menegaskan komitmen Katolik Jawa terhadap prinsip keadilan dan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat pribumi.

Dalam *De Indische Verlofganger* pada 20 Januari 1933, PPKD, Boedi Oetomo, dan Muhammadiyah, menentang peraturan sekolah liar (*wilde scholen*).<sup>156</sup> Hasil pembahasan dari pertemuan tersebut disetujui secara bulat dan diajukan kepada pemerintahan kolonial untuk tidak melanjutkan implementasi dari Peraturan *Wilde Scholen* karena dianggap akan membahayakan kemajuan rakyat pribumi.<sup>157</sup>

## Petisi Soetardjo

Pada 15 Juli 1936, Kasimo bersama dengan Soetardjo, Ratoe Langie, Datoek Toemenggoeng, Ko Kwat Tiong, dan Alatas menandatangani Petisi Soetardjo<sup>158</sup> yang memberikan status kemerdekaan kepada Hindia Belanda dalam batas-batas Pasal I Konstitusi melalui reformasi bertahap dalam waktu sepuluh tahun atau setidaknya dalam waktu yang dianggap memungkinkan oleh konferensi untuk pelaksanaan gagasan tersebut.<sup>159</sup>

Resonansi politik dari petisi tersebut segera tampak dalam Kongres PPKI ke-11 pada 25 Juli 1936. Ketua PPKI Salatiga Ch. J. Soekarja dalam sebuah pertemuan publik

<sup>153</sup> Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia* 4, 280.

<sup>154</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Artati, "De Javaansche Katholieken En de Natinale Beweging," 2.

<sup>155</sup> Anonymous, "Overdracht Onderwijs Aan Locale Raden," *De Koerier*, 10 Maret 1930, 2.

<sup>156</sup> *Wilde Scholen* adalah istilah yang digunakan pada masa kolonial Hindia Belanda untuk menyebut sekolah-sekolah pribumi yang berdiri di luar kontrol resmi pemerintah kolonial.

<sup>157</sup> Anonymous, "Tegen de Wilde Scholen Ordonnantie," *De Indische Verlofganger*, 20 Januari 1933, 13.

<sup>158</sup> Anonymous, *De Petitie Soetardjo* (Leiden: Perhimpunan Indonesia, 1936), 3.

<sup>159</sup> Anonymous, *De Petitie Soetardjo*, 16.

membantah tuduhan dari kaum nasionalis bahwa seorang Katolik tidak bisa menjadi nasionalis sejati.<sup>160</sup> S. Bremani, pembicara kedua, berpendapat bahwa PPKI akan selalu menentang liberalisme, fasisme, nazisme, dan komunisme. PPKI juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi perjuangan ini selalu didasarkan pada solidaritas.<sup>161</sup> Pada kesempatan tersebut, Kasimo, Ketua PPKI, menyampaikan pidato mengenai hak-hak fundamental bagi warga Indonesia dan menjelaskan mengapa PPKI ikut menandatangani petisi Soetardjo. Kasimo juga mengkritik kurangnya fasilitas pendidikan bagi penduduk pribumi. Hal serupa juga terjadi di bidang penggajian, administrasi peradilan, dan lain sebagainya.<sup>162</sup> Salah satu keputusan penting Kongres ke-11 adalah dukungannya pada Petisi Soetardjo: "Kongres PPKI menyatakan dukungannya terhadap usulan petisi dari Bapak Soetardjo dkk."<sup>163</sup>

Dukungan terhadap Petisi Soetardjo akhirnya memperoleh legitimasi moral lebih luas ketika Majalah *Soera Katholiek* (3 Desember 1937) menyatakan dukungan terhadap sikap PPKI yang mendukung Petisi Soetardjo. Majalah tersebut mengungkapkan alasannya, "Karena petisi tersebut berupaya mewujudkan kemajuan bagi Indonesia dan rakyatnya, PPKI harus mendukung petisi tersebut."<sup>164</sup>

Dukungan PPKI terhadap Petisi Soetardjo memperlihatkan bahwa nasionalisme Katolik tidak berhenti pada solidaritas sosial internal, tetapi berkembang menjadi tuntutan politik konstitusional bagi masa depan Hindia Belanda. Dalam diri Kasimo, nasionalisme Katolik menemukan artikulasi yang jelas: pembelaan terhadap hak-hak fundamental warga Indonesia, kritik terhadap ketimpangan kolonial, dan dukungan terhadap jalan politik bertahap menuju kemerdekaan.

## Simpulan

Perkembangan aksi sosial Katolik Jawa adalah hasil interaksi dialektis antara inspirasi global dan dinamika lokal. Pengalaman sejarah secara global dapat ditelusuri dari umat Katolik yang bersatu melawan kebijakan Kulturkampf, perkembangan kesadaran sosial-politik di kalangan umat Katolik Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya berbagai gerakan dan organisasi, dan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus telah menjadi sumber inovasi yang kemudian didifusikan ke konteks lokal dengan terbentuknya aksi sosial, seperti pembentukan berbagai organisasi sosial dan politik Katolik Jawa di Indonesia.

Setelah keluarnya Rerum Novarum, para tenaga misi Katolik di Indonesia mulai tertarik pada masalah-masalah sosial dengan mendirikan organisasi sosial Katolik. Meskipun aktor utama yang terlibat dalam organisasi tersebut adalah orang Eropa dan Indo yang tinggal di Hindia Belanda, mereka telah berperan sebagai *change agents* yang membawa gagasan sosial-politik Katolik Eropa ke Jawa.

Proses difusi ini berjalan efektif karena bertemu dengan kebutuhan lokal:

---

<sup>160</sup> Anonymous, "De P.P.K.I," *De Koerier*, 11 Juni 1937, 11.

<sup>161</sup> Anonymous, "De P.P.K.I," 11.

<sup>162</sup> Anonymous, "De P.P.K.I," 11.

<sup>163</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "Een Motie van de P.P.K.I," *De Locomotief*, 28 Juli 1936, 10.

<sup>164</sup> Diterjemahkan oleh Penulis. Anonymous, "De Volksbeweging," *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 11 Desember 1937, 811.

kesadaran emansipasi pribumi dan kebangkitan nasional. Awal abad ke-20, di antara orang pribumi mulai tumbuh kesadaran kolektif mengenai keterbelakangan pribumi dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan konteks tersebut menemukan konteks penerimaan yang kuat di antara anak muda Jawa Katolik. Para lulusan sekolah Van Lith tidak hanya menjadi bagian dari lapisan intelektual baru, tetapi juga berfungsi sebagai *agents of modernization* yang menghubungkan nilai-nilai universal Katolik dengan aspirasi lokal Jawa. Lembaga pendidikan Van Lith telah menjadi ruang bagi pembentukan kelas menengah terdidik yang kemudian menjadi motor perubahan.

Pendidikan Van Lith telah melahirkan *collective identity* yang unik: berakar pada budaya Jawa, tetapi sekaligus terhubung dengan tradisi Katolik universal. Identitas ini menjadi basis solidaritas yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam politik nasional dengan nilai-nilai Katolik tanpa kehilangan akar budaya lokal.

Dari kalangan anak-anak Jawa yang memperoleh pendidikan Katolik, tumbuhlah rasa percaya diri yang berpadu dengan kesadaran identitas kolektif sehingga mendorong lahirnya berbagai bentuk perjuangan sosial. Kesadaran ini mula-mula diwujudkan melalui pendirian organisasi sosial yang menjadi wadah ekspresi solidaritas dan partisipasi komunitas Katolik dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya *political opportunity structures* (ruang politik kolonial yang mulai terbuka) dan *mobilizing structures* yang dimiliki oleh Katolik Jawa, gerakan tersebut bertransformasi menuju ranah politik dengan mendirikan Pakempalan Politiek Katholiek Djawi (PPKD). Organisasi ini tampil dengan semangat kemandirian, berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang dominasi Eropa, dan akhirnya berkembang menjadi Persatoean Politiek Katholiek Indonesia (PPKI). Kronologi ini memperlihatkan bahwa pendidikan Katolik melahirkan elite Jawa yang tidak hanya berakar pada budaya lokal, tetapi juga berani menegaskan identitas politiknya, yakni menjadikan Katolik Jawa sebagai bagian integral dari arus besar kebangkitan nasional Indonesia.

Gerakan Katolik Jawa dapat dibaca sebagai upaya membangun *counter-hegemony* terhadap dominasi kolonial Belanda yang diwujudkan melalui sikap kritis kepada penguasa dan keberpihakan kepada pribumi, yang menjadi ciri khas dari seluruh gerakan Katolik Jawa.

Dengan demikian, artikel ini memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak hanya dibentuk oleh arus besar organisasi nasionalis sekuler atau keagamaan mayoritas, tetapi juga oleh komunitas Katolik Jawa yang mengolah iman, pendidikan, budaya lokal, dan kesadaran emansipatoris dalam satu praksis kebangsaan.

## Referensi

- Anonymous. "Algemeen Overzicht." *De Java Post*, 28 September 1923.
- \_\_\_\_\_. "Algemeen Overzicht." *De Java Post*, 8 Februari 1924.
- \_\_\_\_\_. "Bij Gouv. Besluit." *De Sumatra Post*, 28 Juni 1932.
- \_\_\_\_\_. "Brieven Uit Indie." *De Tijd* (Batavia), 10 Juni 1912.
- \_\_\_\_\_. "Buitenlandsche Berichten." *De Avondpost Dagblad Voor Stad En Land*, 10 Maret 1892.
- \_\_\_\_\_. "Centrale Der Javaansche Katholieke Bonden." *Onze Missien in Oost En West-Indie Kolonial Missie-Tijdschrift Indische Missie-Vereeniging* 6, no. 6 (1923): 412.
- \_\_\_\_\_. "Christelijke Bladen." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 17

- November 1932.
- \_\_\_\_\_. "De Javaansche Katholiek." *De Koerier*, 21 Februari 1936.
- \_\_\_\_\_. "De Kameleon 'Boedi Oetomo.'" *Verbond Nederland En Indië*, 1 Juni 1929.
- \_\_\_\_\_. "De Missie in Indonesie." *Katholiek Archief* 4e, no. 8 (1949): 157–64.
- \_\_\_\_\_. "De P.P.K.I." *De Koerier*, 11 Juni 1937.
- \_\_\_\_\_. "De R. K. Kerk in Indonesie." *Katholiek Archief* 6e, no. 19 (1951): 363–72.
- \_\_\_\_\_. "De Volksbeweging." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 11 Desember 1937.
- \_\_\_\_\_. "Een Algemeene Boekeninzameling." *Bulletin Der Vereeniging van Den H. Vincentlus van Paulo*, no. 914 (1925): 165–68.
- \_\_\_\_\_. "Een Motie van de P.P.K.I." *De Locomotief*, 28 Juli 1936.
- \_\_\_\_\_. "Godsdienstige Bladen Bintang Islam Van 10 April 1924 No. 7." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 1924.
- \_\_\_\_\_. "Het Congres van de P.P.K.D. Te Solo." *De Locomotief*, 3 Mei 1933.
- \_\_\_\_\_. "Hoofdbestuursvergadering van Pakempalan Politiek Katholik Djawi." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, no. 42 (1925).
- \_\_\_\_\_. "Javaansche Katholieken." *De Tijd*, 4 Maret 1924.
- \_\_\_\_\_. "Javanen Bond." *De Java Post*, 31 Agustus 1923.
- \_\_\_\_\_. "Katholicisme En Javanisme." *De Java Post*, 25 September 1925.
- \_\_\_\_\_. "Katholieke Actie in Indië." *Limburger Koerier*, 29 September 1909.
- \_\_\_\_\_. "Katholieke Javanen En Het Nationalisme." *De Locomotief*, 30 September 1925.
- \_\_\_\_\_. "Katholieke Sociale Bond." *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 17 Juli 1915.
- \_\_\_\_\_. "Midden Java Bladen." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 1 Januari 1930.
- \_\_\_\_\_. "Midden-Java-Bladen." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, no. 16 (April 1931).
- \_\_\_\_\_. "Naamsverandering." *De Koerier*, 30 Juni 1930.
- \_\_\_\_\_. "Overdracht Onderwijs Aan Locale Raden." *De Koerier*, 10 Maret 1930.
- \_\_\_\_\_. "P.P.K.D." *De Locomotief*, 13 Juni 1932.
- \_\_\_\_\_. "Reorganisatie Der Ind. Katholieke Partij." *Het Vaderland*, 2 Mei 1925.
- \_\_\_\_\_. "Swaratama 15 December 1923 No. 31." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, no. 51 (1923).
- \_\_\_\_\_. "Swaratama Van Januari/Februari 1926, Nrs. I/9." *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 1926.
- \_\_\_\_\_. "Tegen de Wilde Scholen Ordonnantie." *De Indische Verlofganger*, 20 Januari 1933.
- \_\_\_\_\_. "Telegrammen Uit de Locomotief." *De Nieuwe Vorstenlanden*, 19 September 1910.
- \_\_\_\_\_. "Uit de Maleisch-Javaansch-Soendaneesche Pers." *Mededeelingen Tijdschrift Voor Zendelingswetenschap*, no. 68 (1924).
- \_\_\_\_\_. "Van Hier En Daar." *Het Nieuwsblad van Het Zuiden*, 5 April 1924.
- \_\_\_\_\_. "Vier Eeuwen." *De Indische Courant*, 8 Agustus 1934.
- \_\_\_\_\_. "Zwitserland." *Utrechtsch Provinciaal En Stedelijk Dagblad*, 2 Februari 1890.
- \_\_\_\_\_. *400 Jaren Missie in Nederlandsch-Indie*. Jubileumnummer van het Maandblad Sociaal Leven. Vol. 15e. Batavia: Sociaal Leven, 1934.
- \_\_\_\_\_. *De Petitie Soetardjo*. Leiden: Perhimpunan Indonesia, 1936.

- \_\_\_\_\_. peny. *Handboekje van de Katholieke Onderwijzersbond in Nederlandsch Indie Deel I*. Batavia: K.O.B, 1938.
- Artati. "De Javaansche Katholieken En de Natinale Beweging." *De Tijd*, 25 Januari 1940.
- Awick, Jerome. "De Inlandsche Beweging." *St. Claverbond* 42, no. 2 (1930): 2–9.
- Banaroesid, Ny. Soerjo. "Onze Katholieke Javaansche Organisatie's." *De Koerier*, 24 Agustus 1934.
- Bates, John C. "Father Daniel A. Lord S.J., and Catholic Action in Western Pennsylvania 1925-1954." *Gathered Fragments*, 2019, 4–31.
- Carr, Edward Hallett. *Apa Itu Sejarah?* Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Conze, Werner. "The German Empire." Dalam *The New Cambridge Modern History Vol. XI Material Progress and World-Wide Problems 1870-1898*, disunting oleh F. H. Hinsley, 274–99. Cambridge: Cambridge University Press, 1962.
- de Mattei, Roberto. "Obedience and Resistance in the History of the Church." *Voice of The Family*, 19 Mei 2018. <https://voiceofthefamily.com/roberto-de-mattei-obedience-and-resistance-in-the-history-of-the-church/>.
- Deijl, C. v. d. "Missienieuws per Luchtpost." *St. Claverbond* 45, no. 2 (1933): 105–12.
- Dhakidae, Daniel, peny. "Simfoni Tiada Henti: Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia." Dalam *Frans Seda Simfoni Tanpa Henti Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia*, disunting oleh Daniel Dhakidae, K. Bertens, dan Frans M. Parera, xxv–xlvii. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Dua, Mikhael. "Politik Pergerakan Menuju Kemandirian Bangsa." Dalam *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama*, disunting oleh Mikhael Dua, Febiana R. Kainama, and Kasdin Sihotang, 25–66. Jakarta: Obor, 2008.
- Hatfield, Douglas W. "Kulturkampf: The Relationship of Church and State and the Failure of German Political Reform." *Journal of Church and State* 23, no. 3 (1981): 465–84. <https://doi.org/10.1093/jcs/23.3.465>.
- Het Hoofdbestuur der Indische Katholieke Partij. *Jubileum Uitgave van de Nieuwe Tijd Orgaan van de Indische Katholieke Partij 1918-1938*. Batavia: IKP, 1938.
- Heuken, Adolf. "Kemerdekaan: Harapan Umat Katolik Di Indonesia." *Orientasi Baru*, no. 9 (1995): 13–20.
- \_\_\_\_\_. *150 Tahun Serikat Jesus Berkarya Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2009.
- Hoctin, Bingem. "Inlandsche Priesters." *Onze Missien in Oost En West-Indie Kolonial Missie-Tijdschrift Indische Missie-Vereeniging*, 1921.
- Huygens, J. "Katholiek Leven Te Semarang." *De Locomotief*, 14 Oktober 1935.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kurris, R. *Sejarah Seputar Katedral Jakarta*. Jakarta: Obor, 1992.
- Leo XIII, Paus. "Rerum Novarum." Dalam *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991*, disunting oleh R. Hardawiryana, 17–58. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999.
- Lowry, John S, peny. "Anticlericalism and the Scars of the Kulturkampf, 1864–1904." Dalam *Big Swords, Jesuits, and Bondelswarts: Wilhelmine Imperialism, Overseas*

- Resistance, and German Political Catholicism, 1897–1906*, 37–54. Leiden: Brill, 2016.
- Mills, C. Wright. *The Power Elite*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Muskens, Martinus P. M. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 4: Pengintegrasian Di Alam Indonesia*. Jakarta: Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1973.
- Oetaja, F. “Katholiek Java Brieven Ovet Het Inheemsche Katholieke Leven.” *Het Huisgezin Roomsch-Katholiek Dagblad Voor Nederland*, 31 Mei 1930.
- \_\_\_\_\_. “Katholiek Java.” *Het Huisgezin Roomsch-Katholiek Dagblad Voor Nederland*, 8 September 1930.
- Renier, Gustaaf Johannes. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Rijckevorsel, J. J. H. M. van. “De Katholieke Sociale Bond Te Batavia.” *De Java Post* (Bandoeng), 27 Juni 1913.
- Slamet, Michael. “Yang Kuingat Dari Sekolah Jesuit Muntilan.” Dalam *Harta Dan Surga: Pesiarahan Jesuit Dalam Gereja Dan Bangsa Indonesia Modern*, edited by A. Budi Susanto, 35–42. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Spekle, A. “Van de Landen Aan Merapi’s Zuidkant.” *St. Claverbond* 44, no. 2 (1932): 177–81.
- Steenbrink, Karel. *Catholics in Indonesia, 1808-1942: The Spectacular Growth of a Self-Confident Minority, 1903-1942*. Leiden: KITLV Press, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Orang-Orang Katolik Indonesia 1808-1942: Pertumbuhan Yang Spektakuler Dari Minoritas Yang Percaya Diri 1903-1942*. Flores: Ledalero, 2006.
- Strater, F. “Javaansche Lectuur.” *De Java Post*, 8 Agustus 1919.
- Sukarno. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1969.
- Syafitri, Amelia. “Respon PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) Terhadap Ordonansi Sekolah Liar Di Hindia Belanda (1932-1933).” Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Thomson, David. “Social and Political Thought.” Dalam *The New Cambridge Modern History Vol. XI Material Progress and World-Wide Problems 1870-1898*, disunting oleh F.H. Hinsley, 101–20. Cambridge: Cambridge University Press, 1962.
- Tim Wartawan Kompas. *I. J. Kasimo Hidup Dan Perjuangannya*. Jakarta: PT Gramedia, 1980.
- van Aernsbergen, A. I, peny. *Chronologisch Overzicht van de Werkzaamheid Der Jezuiten in de Missie van N. O.-I. Bij den 75sten Verjaardag van Hun Aankomst in de Nieuwe Missie 1859 - 9 Juli - 1934*. Amsterdam: N.V. de R.K. Boekcentrale, 1934.
- van Klinken, Gerry. *5 Penggerak Bangsa Yang Terlupa; Nasionalisme Minoritas Kristen*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- van Lith, F. *De Politiek van Nederland Ten Opzichte van Nederlandsch-Indië*. Magistratenlaan: L.C.G. Malmberg, 1922.
- van Niel, Robert. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Vermeulen, E. D. *Verslag Der Werkzaamheden van Den Katholieken Jongelingen-Bond Te Batavia Gedurende Zijn Derde Vereenigingsjaar: April 1916 - 31 Maart 1917*. Weltevreden, 1917.
- Weve, Door L. “Geschiedkundig Overzicht van de Eerste 25 Jaren.” Dalam *Java Aan*

*Christus: 25 Jaar Priester-Opleiding 1911-1916 Java-Missie Der Jezuïeten, 1-14.*  
Nijmegen: Missiebond der Paters Jezuïeten, 1936.